



Kementerian PPN/
Bappenas



KANTOR STAF PRESIDEN



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA VII TAHUN 2023-2024

SEMESTER II TAHUN 2023

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



sekretariat.ogi@bappenas.go.id



@opengovindo



Open Government Indonesia

Disusun oleh:

- 1. Maharani Putri S.W**
- 2. Theodorus Agustinus H**
- 3. Andrieta Rafaela**

2024

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
CATATAN UMUM DAN TINDAK LANJUT RAN OGI VII 2023-2024: SEMESTER II	6
ISU STRATEGIS DAN KOMITMEN RAN OGI VII 2023-2024	7
STRATEGI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENYUSUNAN LAPORAN... ..	12
DESKRIPSI CAPAIAN 15 KOMITMEN RAN OGI VII 2023-2024	15
Komitmen 1	15
Komitmen 2	24
Komitmen 3	26
Komitmen 4	28
Komitmen 5	32
Komitmen 6	34
Komitmen 7	36
Komitmen 8	38
Komitmen 9	40
Komitmen 10	43
Komitmen 11	45
Komitmen 12	52
Komitmen 13	57
Komitmen 14	61
Komitmen 15	67

RINGKASAN EKSEKUTIF

RAN OGI VII Tahun 2023-2024 terdiri atas enam isu strategis, yaitu: 1) anti-korupsi dan anggaran, 2) pelayanan publik yang inklusif, 3) ruang kewargaan dan demokrasi, 4) akses terhadap keadilan, 5) kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), dan 6) energi, lingkungan, dan sumber daya alam. Enam isu strategis tersebut terbagi dalam 15 komitmen, 37 ukuran keberhasilan dan 302 target capaian yang diimplementasikan oleh 21 Kementerian/Lembaga dan 18 Organisasi Masyarakat Sipil. Untuk semester 2 (B12) sendiri, terdapat 73 target capaian.

Dari implementasi tahun pertama RAN OGI VII Tahun 2023-2024, terdapat beberapa komitmen yang memiliki capaian 100% dan dijalankan dengan ko-kreasi yang aktif. Komitmen-komitmen tersebut antara lain **Komitmen 5** (Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dan Disinformasi), **Komitmen 7** (Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas), **Komitmen 12** (Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia), dan **Komitmen 13** (Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia). Di sisi lain, ada komitmen yang masih memiliki capaian kurang dan ko-kreasi pasif, yakni **Komitmen 4** (Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi) dan **Komitmen 6** (Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum).

Secara keseluruhan, capaian akumulatif B06 dan B12 menunjukkan bahwa mayoritas dari komitmen mendapatkan nilai baik, meskipun capaian dan proses ko-kreasi per semester untuk B12 mengalami penurunan dibandingkan dengan B06. Hasil dari Monitoring dan Evaluasi implementasi tahun pertama menjadi catatan dan refleksi penting bagi semua pemangku kepentingan dalam menyelesaikan dua semester terakhir dari RAN OGI VII Tahun 2023-2024.

ISU STRATEGIS DAN DAFTAR KOMITMEN RAN OGI VII 2023-2024

Adapun daftar komitmen RAN OGI VII Tahun 2023-2024 yang dikelompokkan berdasarkan isu strategisnya sebagai berikut.

Tabel 1.

Daftar Komitmen RAN OGI VII Tahun 2023-2024 dan Pelaksana

No.	Judul Komitmen	K/L dan OMS Pelaksana
Anti-Korupsi dan Anggaran		
1.	Komitmen 1: Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Komisi Informasi Pusat (KIP) 3. Indonesia Corruption Watch (ICW) 4. Transparency International Indonesia (TII)
2.	Komitmen 2: Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Kantor Staf Presiden RI 3. PPATK 4. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 5. Stranas-PK 6. Kementerian ESDM 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8. Kementerian Pertanian 9. Kementerian ATR/BPN 10. Kementerian Keuangan 11. Publish What you Pay (PWYP), TII, ICW

Ruang Kewargaan dan Demokrasi		
3.	Komitmen 3: Perlindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2. Kepolisian Republik Indonesia 3. Auriga Nusantara
4.	Komitmen 4: Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Yayasan TIFA
5.	Komitmen 5: Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dan Disinformasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum 2. Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL)
6.	Komitmen 6: Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Pelayanan Publik yang Inklusif		
7.	Komitmen 7: Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Suarise
8.	Komitmen 8: Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri 2. TII
9.	Komitmen 9: Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2. Wahana Visi Indonesia 3. TII

Akses terhadap Keadilan		
10.	Komitmen 10: Penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) untuk Memenuhi Hak Atas Kebenaran*	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Hukum dan HAM 2. Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, KontraS Aceh
11.	Komitmen 11: Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Agung (MA) 2. Kejaksaan Agung 3. Kepolisian Republik Indonesia 4. Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Asosiasi LBH APIK Indonesia
12.	Komitmen 12: Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM 2. MA 3. IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia
13.	Komitmen 13: Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPHN 2. IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia
Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)		
14.	Komitmen 14: Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

		3. Kementerian Hukum dan HAM 4. International NGO Forum on Indonesian Development, IJRS
Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam		
15.	Komitmen 15: Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang	1. Sekretariat Satu Data Indonesia 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 5. Indonesia Center for Environmental Law, Auriga Nusantara, PWYP, MediaLink

*Komitmen tidak dilanjutkan sehubungan dengan adanya upaya non-yudisial dari pemerintah atas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

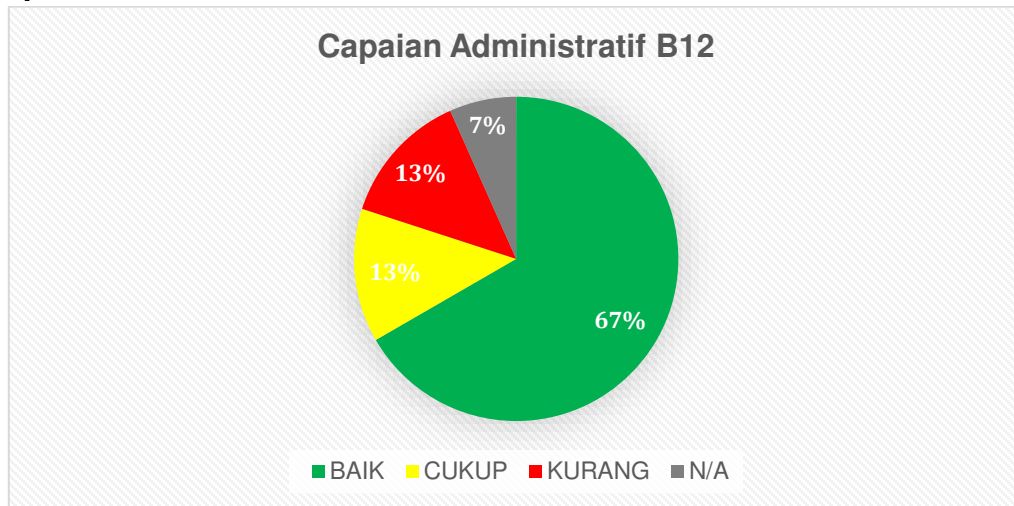
GAMBARAN UMUM MONEV RAN OGI VII 2023-2024: SEMESTER I - II

Adapun gambaran umum dari temuan monitoring dan evaluasi Semester I - Semester II RAN OGI VII Tahun 2023-2024 sebagai berikut:

1. Capaian Administratif Semester II RAN OGI VII 2023-2024

Capaian administratif merupakan nilai dari hasil kinerja Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan target capaian. Adapun capaian administratif dalam pelaksanaan RAN OGI VII Tahun 2023-2024 Semester II sebagai berikut:

Gambar 1.
Capaian Administratif Pelaksanaan Semester II RAN OGI VII 2023-2024



Sumber: Monitoring dan Evaluasi Semester II Tahun 2023

- a. Dari hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi, **67%** komitmen atau sejumlah **10** komitmen mendapatkan nilai baik yang menunjukkan target capaian telah terlaksana dengan baik. 10 komitmen tersebut antara lain, yakni:

Tabel 2.
Daftar Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Baik

Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 1	Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Komitmen 2	Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership
Komitmen 3	Perlindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup
Komitmen 5	Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dan Disinformasi
Komitmen 7	Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Komitmen 8	Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa

Komitmen 9	Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
Komitmen 12	Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia
Komitmen 13	Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia
Komitmen 15	Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang

- b. **13%** komitmen atau sejumlah **2** komitmen mendapatkan nilai cukup yang menunjukkan target capaian belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan membutuhkan penyelesaian lebih lanjut dari masing-masing *stakeholder* pelaksana. 2 komitmen tersebut, yakni:

Tabel 3.

Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Cukup

Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 11	Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia
Komitmen 14	Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

- c. **13%** komitmen atau sejumlah **2** komitmen mendapatkan nilai kurang yang menunjukkan komitmen tidak dapat diselesaikan secara baik oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. 2 komitmen tersebut yakni:

Tabel 4.

Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Kurang

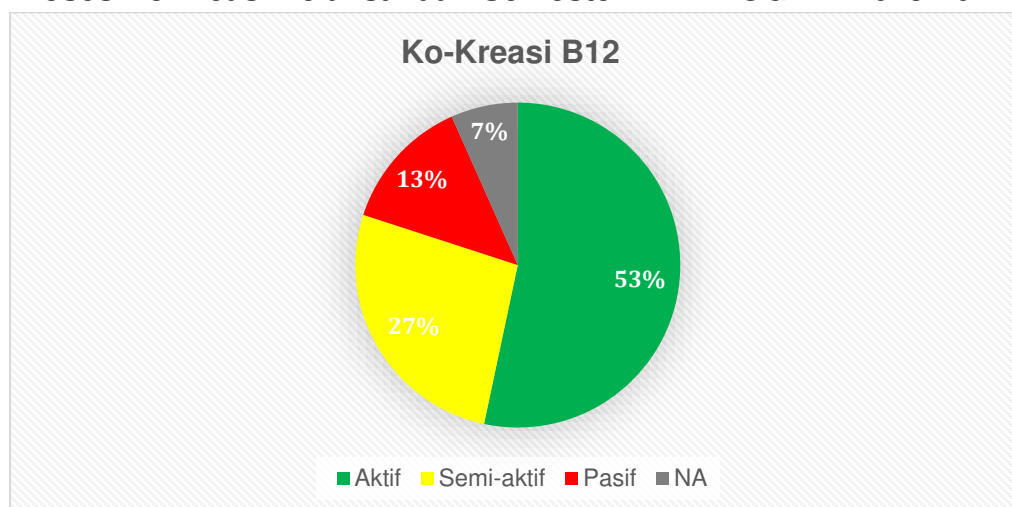
Nomor Komitmen	Judul Komitmen
----------------	----------------

Komitmen 4	Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
Komitmen 6	Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum

2. Proses Ko-kreasi Semester II

Proses ko-kreasi merupakan penilaian hasil kerja sama maupun kolaborasi bermakna yang dibangun antar Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam mencapai target capaian. Temuan proses ko-kreasi pelaksanaan RAN OGI VII 2023-2024 pada Semester II adalah sebagai berikut:

Gambar 2.
Proses Ko-kreasi Pelaksanaan Semester II RAN OGI VII 2023-2024



Sumber: Monitoring dan Evaluasi Semester II Tahun 2023

- a. Dari hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi, **53%** komitmen atau sejumlah **8** komitmen menunjukkan capaian ko-kreasi aktif, yang menunjukkan proses kolaborasi bermakna antara K/L dan OMS berjalan secara baik. **8** komitmen tersebut antara lain, yakni:

Tabel 5.

Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Aktif

Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 1	Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Komitmen 2	Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership
Komitmen 3	Perlindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup
Komitmen 5	Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dan Disinformasi
Komitmen 7	Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
Komitmen 12	Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia
Komitmen 13	Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia
Komitmen 15	Pengembangan Sistem Satu Data Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) yang Menjamin Keterbukaan Data dan Informasi Perizinan dan Tata Ruang

- b. **27%** komitmen atau sejumlah **4** komitmen menunjukkan proses ko-kreasi semi-aktif, yang menunjukkan baik K/L maupun OMS belum sepenuhnya berkolaborasi secara optimal. **4** komitmen tersebut antara lain, yakni:

Tabel 6.

Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Semi-Aktif

Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 8	Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa

Komitmen 9	Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
Komitmen 11	Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia
Komitmen 14	Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

- c. **13%** komitmen atau sejumlah **2** komitmen menunjukkan proses ko-kreasi kurang, yang menunjukkan baik K/L maupun OMS belum berkolaborasi secara bermakna. **2** komitmen tersebut yakni:

Tabel 7.
Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Pasif

Nomor Komitmen	Judul Komitmen
Komitmen 4	Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
Komitmen 6	Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum

CATATAN UMUM DAN TINDAK LANJUT RAN OGI VII 2023-2024: SEMESTER II

Berikut poin-poin refleksi dan rekomendasi tindak lanjut yang didapatkan selama pelaksanaan RAN OGI VII 2023-2024 pada Semester I hingga Semester II, antara lain:

1. **Peningkatan ko-kreasi antar aktor Pemerintah dan Non-Pemerintah**

Pada semester II, nilai ko-kreasi mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian ko-kreasi pada semester I. Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan target capaian yang telah ditetapkan, karena target tidak dapat dicapai secara sempurna jika para aktor tidak saling bekerja sama. Kedepannya, proses ko-kreasi antar aktor perlu ditingkatkan dalam melaksanakan target capaian yang telah ditetapkan. Ko-kreasi yang dilakukan dapat berbentuk diskusi bersama antar pemangku kepentingan, pemberian masukan atau catatan kebijakan, dan komunikasi berkala untuk mendukung pencapaian

pelaksanaan target capaian. Sekretariat Nasional OGI juga akan memfasilitasi diskusi rutin untuk membahas komitmen, terutama komitmen-komitmen yang masih mengalami tantangan ko-kreasi.

2. Penunjukkan Penanggung Jawab (PIC) untuk implementasi komitmen dan koordinasi berkala antar PIC Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Salah satu kendala yang dilaporkan dalam pencapaian target dan ko-kreasi adalah pergantian PIC untuk komitmen atau tidak adanya perwakilan yang ditugaskan sebagai PIC untuk implementasi komitmen. Peran PIC menjadi penting untuk memastikan koordinasi antar pemangku kepentingan dapat berjalan lancar untuk mengetahui dukungan yang dibutuhkan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan setiap komitmen. Koordinasi antar PIC Kementerian/Lembaga dan OMS pelaksana komitmen juga penting untuk melakukan ko-kreasi dan memastikan masing-masing pihak mendapatkan informasi berkala mengenai capaian komitmen. Bila hendak dilakukan perubahan PIC, perubahan tersebut dapat disertai dengan *knowledge transfer* kepada PIC baru.

3. Adanya *buy-in* dari pimpinan Kementerian/Lembaga untuk menjamin keberlanjutan implementasi komitmen RAN OGI VII

Salah satu hal yang dapat memastikan keberlanjutan implementasi komitmen adalah adanya *buy-in* dari pimpinan Kementerian/Lembaga. Dengan adanya *buy-in* tersebut, implementasi komitmen dapat menjadi prioritas bagi Kementerian/Lembaga, sehingga akan didukung oleh perencanaan, sumber daya, dan anggaran yang memadai. Hal ini juga mencegah adanya penghentian komitmen akibat pergantian pemerintahan pasca pemilihan umum tahun 2024.

MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENYUSUNAN LAPORAN

MEKANISME PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA DUKUNG RAN OGI VII 2023-2024

Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan dua pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan RAN OGI secara ko-kreasi. Dalam pelaksanaan RAN OGI VII 2023-2024, terdapat 21 Kementerian/Lembaga dan 18 OMS yang memiliki sejumlah target capaian yang perlu untuk dilaksanakan dan dilaporkan setiap semesternya kepada Sekretariat Nasional OGI.

Pelaporan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan OMS diharapkan selaras dengan ukuran keberhasilan serta target capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen RAN OGI VII 2023-2024. Lebih dari itu, diharapkan, dalam pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut, Pemerintah bersama dengan OMS dapat mengerjakannya dengan mengedepankan proses ko-kreasi, sebagai bentuk kolaborasi antara Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil.

Memasuki periode pelaporan, Pemerintah dan OMS akan memberikan Data Dukung terkait pelaksanaan komitmen melalui dua kanal yang berbeda, yaitu:

1. SISMONEV Kantor Staf Presiden - bagi Kementerian/Lembaga
2. SISMONEV OGI - bagi OMS

MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN RAN OGI VII 2023-2024

Dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan, Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu dari proses tersebut yang perlu menjadi perhatian. Sekretariat Nasional OGI, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan keberjalanan implementasi, memiliki tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi RAN OGI VII 2023-2024. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan waktu Target Capaian, yaitu Semester I (B06), Semester II (B12), Semester III (B18), dan Semester IV (B24). Hingga dokumen ini diterbitkan, Sekretariat Nasional OGI telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi bagi Target Capaian Semester I dan Semester II. Adapun penjelasan terkait kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan akan dijelaskan pada bagian berikut.

1. Pemantauan (*Monitoring*)

Sekretariat OGI bertugas untuk melaksanakan pemantauan (monitoring) secara intensif pada akhir semester berjalan dengan cara:

- a. Mempelajari laporan data dukung capaian target semester Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil;

- b. Melakukan konfirmasi apabila dinilai terdapat data dukung maupun hal-hal lainnya yang kurang jelas atau perlu dilengkapi oleh Kementerian Lembaga/ Organisasi Masyarakat Sipil.

Mekanisme pemantauan akan dijalankan oleh Sekretariat OGI sepanjang waktu target capaian berjalan, hingga pada periode monitoring dan evaluasi RAN OGI VII 2023-2024 setiap semesternya.

2. Evaluasi

Sekretariat Nasional OGI melaksanakan evaluasi terhadap capaian target yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam memberikan penilaiannya, Sekretariat Nasional OGI tidak hanya melakukan penilaian secara administratif, tetapi juga kualitas pelaksanaan yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memastikan rencana aksi yang dilaporkan memang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara ko-kreasi;
- b. Memastikan rencana aksi dilaksanakan dengan kualitas yang baik;
- c. Memastikan rencana aksi akan berkesinambungan;
- d. Memastikan para pelaksana menyadari bahwa rencana aksi membawa perubahan (*output-outcome*);
- e. Memastikan rencana aksi telah mencapai perubahan (*dampak/impact*) tidak hanya bagi pelaksana tapi juga penerima manfaat (masyarakat luas).

Selain itu, Sekretariat Nasional OGI melakukan analisis yang terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi capaian target, termasuk hambatan yang dialami oleh masing-masing komitmen, mulai dari Ukuran Keberhasilan, hingga Target Capaian masing-masing semester;
- b. Melakukan identifikasi Ko-kreasi serta Target Semester yang belum terselesaikan. Sekretariat OGI akan menganalisis kegiatan ko-kreasi yang dilakukan masing-masing pelaksana, serta meninjau kembali pelaksanaan target capaian yang tidak dapat diselesaikan pada periode sebelumnya

Proses Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII 2023-2024 dilaksanakan Sekretariat Nasional OGI dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penilaian Capaian Administratif

Salah satu komponen penilaian yang dilakukan oleh Sekretariat OGI ialah penilaian Capaian Administratif. Penilaian ini bermakna untuk mengukur hasil kinerja Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan target capaian di dalam komitmen. Adapun kriteria penilaian pada bagian ini terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 8.
Skala Penilaian Capaian Administratif

Skala Nilai	Keterangan
70-100	Baik
51-69	Cukup
0-50	Kurang
N/A	<i>Not Available*</i>

*Target tidak dapat diukur pelaksanaannya karena membutuhkan dukungan dari pelaksana lainnya

b. Penilaian Proses Ko-kreasi

Sebagai salah satu mandat dalam pelaksanaan RAN, Sekretariat OGI menjadikan Proses Ko-kreasi sebagai salah satu komponen penilaian. Komponen ini menjelaskan sejauh mana ko-kreasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan komitmen RAN OGI. Adapun kriteria penilaian proses ko-kreasi sebagai berikut:

Tabel 9.
Skala Penilaian Proses Ko-kreasi

	Aktif
	Semi-Aktif
	Pasif
	(N/A) Tidak bisa dilaksanakan, karena bergantung pada pelaksana lainnya

c. Penyusunan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Penyusunan laporan yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional OGI setiap akhir semester memberikan penekanan maupun sorotan baik secara kualitatif dan kuantitatif terhadap dua hal, yakni:

- 1) Capaian Administratif;
- 2) Proses Ko-kreasi.

Selain itu, laporan Monitoring dan Evaluasi juga mengandung bagian refleksi implementasi dan rekomendasi tindak lanjut b18 sebagai acuan bagi pelaksana RAN.

DESKRIPSI CAPAIAN 15 KOMITMEN RAN OGI VII 2023-2024

Komitmen 1

Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ukuran Keberhasilan 1:		
Publikasi Transaksi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di e-katalog		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		
Target B06: Dilaksanakannya rapat yang membahas komponen informasi transaksi e-katalog yang akan dipublikasi bersama dengan masyarakat sipil	Capaian Target: Rapat telah mendiskusikan terkait keterbukaan publikasi komponen informasi transaksi e-katalog antara lain berupa informasi perkembangan penayangan produk, komposisi jumlah produk berdasarkan jenis, detail transaksi e-purchasing dan unduhannya. Diskusi telah dilaksanakan di beberapa unit kerja pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, juga bersama dengan masyarakat sipil, yakni ICW.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Secara keseluruhan, LKPP dan OMS telah menjalin ko-kreasi dan komunikasi yang baik, diskusi dengan masyarakat sipil dilaksanakan pada 15 Agustus 2023 setelah periode Monev B06 dan data dukung disampaikan melalui mekanisme pelengkapan laporan.	Aktif
Target B12: Mempublikasi komponen informasi transaksi e-katalog berdasarkan hasil rapat pembahasan	Capaian Target: LKPP telah mempublikasikan komponen informasi transaksi e-katalog berdasarkan hasil rapat pembahasan. Detail jenis laporan telah disampaikan dalam data dukung.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP telah menghadiri pembahasan mengenai RUU PBJ yang diselenggarakan OMS dalam rangka pencapaian ukuran keberhasilan ini.	Aktif

Indonesia Corruption Watch (ICW) & Transparency International Indonesia (TII)		
Target B06: Adanya diskusi untuk menyepakati komponen informasi transaksi yang harus dipublikasi K/L/PD di ekatalog	Capaian Target: OMS telah melaksanakan diskusi dengan LKPP terkait Revisi Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa yang membahas mengenai risiko korupsi e-procurement, Daftar Inventaris Masalah (DIM) pengadaan versi masyarakat sipil, dan strategi advokasi kedepannya. Salah satu aspek dalam DIM RUU PBJ mencakup pengadaan darurat. OMS juga telah menuliskan dokumen yang berisikan argumentasi dan rekomendasi terhadap pengembangan sistem-sistem PBJ ke depannya. Namun, pembahasan penyepakatan komponen transaksi yang perlu dipublikasi K/L/PD di dalam e-katalog belum menjadi fokus pada diskusi tersebut.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi OMS dengan LKPP secara keseluruhan dinilai baik, walaupun untuk Ukuran Keberhasilan 1 di B06 ini belum ada ko-kreasi dalam mencapai target penyepakatan komponen informasi transaksi yang harus dipublikasi K/L/PD di e-katalog.	Aktif
Target B12: Penyerahan komponen informasi transaksi yang harus dipublikasi K/L/PD	Capaian Target: Publikasi informasi sudah dilakukan oleh K/L/PD. Namun, untuk periode berikutnya, perlu ada evaluasi kembali dan perbaikan kualitas informasi yang dipublikasikan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: OMS telah menyelenggarakan pembahasan mengenai RUU PBJ yang dihadiri oleh LKPP dalam rangka pencapaian ukuran keberhasilan ini.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		

Target B06: Pembahasan terkait komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE dengan melibatkan masyarakat sipil	Capaian Target: Pengembangan dashboard pengadaan darurat saat ini sudah ada pada SPSE 4.5. Rapat koordinasi telah terlaksana antara Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan LKPP dengan Indonesia Corruption Watch dalam membahas komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kegiatan pembahasan komponen informasi PBJ darurat dalam rapat koordinasi dilaksanakan secara ko-kreasi.	Aktif
Target B12: Penyesuaian informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan pada LPSE	Capaian Target: LKPP telah menerima rekomendasi terkait informasi PBJ darurat yang dapat ditampilkan. Selain itu, LKPP sedang melakukan revisi mengenai Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2013 dan uji publik dalam rangka penyusunan inventarisasi masalah Peraturan Lembaga tersebut dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil (ICW).	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP dan OMS telah melakukan pembahasan aktif mengenai penyesuaian informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan pada LPSE.	Aktif
Indonesia Corruption Watch (ICW) & Transparency International Indonesia (TII)		
Target B06: Pembahasan terkait komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE	Capaian Target: TII telah melaksanakan diskusi dengan LKPP terkait Revisi Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa yang membahas mengenai risiko korupsi e-procurement, Daftar Inventaris Masalah (DIM) pengadaan versi masyarakat sipil, dan strategi advokasi kedepannya. Salah satu aspek	Nilai:100%

dengan melibatkan masyarakat sipil	dalam DIM RUU PBJ mencakup pengadaan darurat. ICW telah terlibat dalam diskusi mengenai informasi yang perlu dipublikasi dalam kanal PBJ darurat. Kelengkapan informasi dari sisi realisasi dibutuhkan untuk pengembangan dashboard pengadaan darurat. ICW akan menyusun kajian/rekomendasi terkait informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pengadaan darurat.	
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan antara OMS dengan LKPP melalui penyelenggaraan diskusi dan rapat koordinasi.	Aktif
Target B12: Penyerahan komponen informasi yang perlu dipublikasi dalam kanal PBJ darurat	Capaian Target: ICW telah menyerahkan catatan atas pengadaan darurat, termasuk mengenai keterbukaan informasi dan komponen informasi yang dibutuhkan dalam Pengadaan Darurat di SPBE	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP dan OMS telah melakukan pembahasan aktif mengenai penyesuaian informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan pada LPSE. Salah satu kegiatan pembahasan yang diselenggarakan antara lain FGD pada 14 September.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 3: Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		
Target B06: Persiapan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	Capaian Target: Sampai dengan 31 Mei 2023, terdapat 83 Inspektorat K/L/PD yang telah bergabung dalam sistem e-pengaduan. Akan tetapi, pada April 2023 terdapat insiden keamanan informasi pada sistem e-pengaduan yang kemudian dilakukan pembahasan kendala antara Pusdatin LKPP,	Nilai: 100%

	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, dan BSSN. Akibat adanya insiden tersebut, alternatif penyampaian pengaduan hingga saat ini masih dilakukan melalui persuratan lewat e-office LKPP.	
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi tidak dapat dinilai dikarenakan OMS tidak memiliki capaian target untuk B06 pada Ukuran Keberhasilan 3 ini.	N/A
Target B12: Melibatkan partisipasi inspektorat K/L/PD ke sistem e-pengaduan	Capaian Target: LKPP telah memberikan pelatihan dan piloting terkait dengan pengembangan e-pengaduan kepada 120 inspektorat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP dan ICW telah melakukan beberapa pertemuan untuk membahas implementasi target ini, antara lain pada tanggal 9, 21, 24, dan 28 November 2023.	Aktif
Indonesia Corruption Watch (ICW)		
Target B06: Tidak ada target B06	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: Pendampingan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	Capaian Target: ICW telah terlibat dalam proses pendampingan integrasi, terutama untuk perbaikan platform e-pengaduan agar integrasi dapat terlaksana dan untuk meningkatkan kualitas platform tersebut secara umum.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: LKPP dan ICW telah melakukan beberapa pertemuan untuk membahas implementasi target	Aktif

	ini, antara lain pada tanggal 9, 21, 24, dan 28 November 2023.	
Ukuran Keberhasilan 4: Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		
Target B06: Pembahasan terkait data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKAP dengan melibatkan OMS	Capaian Target: Telah dilakukan rapat pembahasan antara LKPP dan ICW pada 7 Juni 2023 yang membahas mengenai data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP. Publikasi komponen di SIKAP saat ini sudah terhubung dengan data Beneficial Ownership di Website BO.AHU.go.id, harapannya akan dapat ditampilkan riwayat penyedia yang memiliki daftar hitam/blacklist untuk pengadaan dan riwayat pekerjaan. Nama penyedia dan riwayat kemenangan tender menjadi salah satu data kinerja penyedia yang saat ini dapat dilihat publik tanpa perlu login. Apabila login dengan akun ppk akan dapat terlihat pula nilai yang diberikan terhadap penyedia.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Pembahasan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKAP dilakukan secara ko-kreasi dengan mengundang OMS untuk mengidentifikasi komponen yang harus dipublikasi beserta alasan kepentingannya.	Aktif
Target B12: Persiapan integrasi data SIKAP dengan data Beneficial Ownership Kementerian Hukum dan HAM	Capaian Target: Kemenkumham dan LKPP telah menandatangani perjanjian kerja sama. Harapannya kedepan dapat diteruskan segera untuk pemanfaatan data BO kepada sistem pengadaan barang dan jasa.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Aktif

	Pelaksanaan integrasi data SIKAP telah dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari ICW.	
Indonesia Corruption Watch (ICW)		
Target B06: Koordinasi dengan LKPP mengenai data kinerja penyedia yang akan terpublikasi di SIKAP.	Capaian Target: Koordinasi telah dilakukan untuk penyediaan data kinerja penyedia di SIKAP melalui rapat pembahasan di tanggal 7 Juni 2023. Beberapa hal yang menjadi review dari ICW mencakup data paket pekerjaan yang dimenangkan, data pelanggaran blacklist, nilai rupiah dan jumlah paket yang dimenangkan per tahun.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi dilaksanakan melalui keterlibatan ICW dalam rapat koordinasi yang diundang oleh LKPP.	Aktif
Target B12: Koordinasi dengan LKPP mengenai pengembangan database SIKAP yang terintegrasi	Capaian Target: ICW telah membuat kajian yang terdiri dari beberapa muatan, antara lain telaah Komponen Informasi untuk SIKAP. Kajian tersebut sudah disampaikan ke LKPP melalui audiensi.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: ICW dan LKPP telah melakukan ko-kreasi untuk komponen informasi database SIKAP.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 5: Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		
Target B06: 1. Pembahasan terkait informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1	Capaian Target: Telah dilaksanakan rapat yang membahas mengenai mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama. Terkait	Nilai: 100%

<p>Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP dengan melibatkan OMS</p> <p>2. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama</p>	<p>mekanisme/bentuk kode unik yang menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang dalam satu objek program yang sama, kegiatan yang telah dilakukan oleh LKPP meliputi analisa belanja pemerintah dengan menggunakan kode unik berdasarkan kinerja realisasi PBJ K/L dan Pemda bukan kinerja perencanaan. Kode unik sedang tahap pengembangan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital dan Direktorat Pasar Digital Pengadaan. Terkait informasi yang wajib dibuka sesuai Perki SLIP, pada Februari lalu LKPP telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) namun jangka waktu beberapa dokumen DIK ada yang terlalu lama sehingga akan dimutakhirkan.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Proses ko-kreasi telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi yang memiliki muatan bahasan mengenai DIP & DIK serta pembahasan kode unik untuk menyatukan pekerjaan dalam proses pengadaan.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p> <p>1. Persiapan fitur publikasi yang mengakomodir komponen informasi PBJ berdasarkan hasil kesepakatan</p> <p>2. Persiapan pengembangan kode unik berdasarkan hasil kesepakatan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>1. OMS (ICW) telah mengirimkan rekomendasi terkait apa saja yang perlu ditampilkan terkait informasi SPSE.</p> <p>2. Telah dilakukan diskusi di internal LKPP terkait kebutuhan pengembangan kode unik dikembangkan di SPSE. Saat ini di aplikasi SIRUP telah terdapat data dan informasi terkait kebutuhan pengadaan melalui RUP.</p> <p>Telah dilakukan publikasi informasi melalui siaran pers dan berita pada website LKPP.</p>	<p>Nilai: 100%</p>
	<p>Proses Ko-kreasi:</p>	<p>Aktif</p>
<p>Indonesia Corruption Watch (ICW)</p>		
<p>Target B06:</p>	<p>Capaian Target:</p>	<p>Nilai: 100%</p>

1. Adanya diskusi untuk menyepakati informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP	Diskusi telah dilaksanakan pada Juni 2023 sebagai bentuk awalan pembahasan mengenai daftar informasi publik yang dibuka, akan tetapi belum ada kesepakatan informasi apa yang akan dibuka sesuai Perki SLIP. Hal ini akan dikaji lebih lanjut oleh ICW. Pembahasan mengenai mekanisme dan bentuk kode unik juga menjadi salah satu poin diskusi yang usulannya akan diberikan pula argumentasi dan manfaatnya.	
2. Adanya diskusi terkait mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang melibatkan ICW dan LKPP	Aktif
Target B12: 1. Koordinasi publikasi informasi sesuai dengan	Capaian Target: ICW telah mengirimkan kajian yang berisi rekomendasi terkait apa saja yang perlu ditampilkan terkait informasi SPSE. ICW juga telah memberikan masukan mengenai Kode Unik Proyek.	Nilai: 100%

<p>kesepakatan diskusi</p> <p>2. Koordinasi dengan LKPP terkait pengembangan kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan terkait dalam satu objek program yang sama</p>	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>ICW telah menyampaikan hasil kajian kepada LKPP dalam sebuah audiensi. Hasil kajian tersebut juga sedang ditindaklanjuti oleh LKPP dalam diskusi internal, sehingga ko-kreasi dinilai aktif.</p>	Aktif
<p>Ukuran Keberhasilan 6:</p> <p>Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)		
<p>Target B06:</p> <p>Pembahasan MOU antara LKPP dengan OMS</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara LKPP dengan ICW dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dalam kegiatan Open Government Week 2023. Salah satu kegiatan yang akan didorong adalah peningkatan kompetensi kepada masyarakat tentang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa bekerja sama dengan ICW dan TII.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Pembahasan substansi MoU dan penandatanganan MoU dilaksanakan dengan ko-kreasi antara LKPP, ICW, dan IAPI.</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>1. Tersedianya MOU antara LKPP dengan OMS berdasarkan pembahasan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>1. Telah terdapat MoU antara LKPP dengan ICW terkait dengan pengawasan pengadaan barang/jasa. 2. Telah diselenggarakan peningkatan kompetensi terkait pengawasan PBJ, antara lain oleh Pusat SDM PBJ dalam rangka</p>	Nilai: 100%

<p>yang telah dilaksanakan sebelumnya</p> <p>2. Keterlibatan dalam peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah</p>	<p>penguatan partisipasi dan peran UMKK, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan Direktorat Penanganan Permasalahan terkait kasus PBJ Pemerintah.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Sudah ada MoU antar LKPP dan OMS</p>	Aktif
Indonesia Corruption Watch (ICW)		
<p>Target B06:</p> <p>Pembahasan MoU antara LKPP dengan OMS</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara LKPP dengan ICW dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dalam kegiatan Open Government Week 2023. Salah satu kegiatan yang akan didorong adalah peningkatan kompetensi kepada masyarakat tentang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa bekerja sama dengan ICW dan TII.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Pembahasan substansi MoU dan penandatanganan MoU dilaksanakan dengan ko-kreasi antara LKPP, ICW, dan IAPI.</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>Penyelenggaraan peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah diselenggarakan pelatihan PBJ untuk CSO di Maros, CSO di Kupang, dan Sekolah Antikorupsi Pemuda</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>LKPP terlibat sebagai narasumber di pelatihan yang diselenggarakan ICW</p>	Aktif
Ukuran Keberhasilan 7:		

Implementasi informasi PBJ Pemerintah menurut Perki 1/2021		
KIP		
Target B06: Review Indikator Pengadaan Barang/Jasa untuk Monev Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan masyarakat sipil	Capaian Target: Telah dilaksanakan FGD yang mengundang OMS pada Februari 2023 terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Monev KIP, namun diskusi belum sepenuhnya membahas mengenai evaluasi terhadap indikator di Monev Keterbukaan Informasi Publik khususnya di pengadaan barang dan jasa.	Nilai: 80%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan dengan mengundang OMS pada FGD untuk evaluasi terkait pelaksanaan monev. Akan tetapi, monev dan indikatornya saat ini sudah diedarkan dan tidak bisa diubah sehingga pembahasan mengenai indikator pengadaan barang/jasa di monev keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sipil.	Semi-Aktif
Target B12: Publikasi Kuesioner Indikator Penilaian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik	Capaian Target: KIP telah menyusun daftar pertanyaan terkait dengan kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kuesioner juga dapat dilihat di sistem E-Monev KIP (https://e-monev.komisiinformasi.go.id/)	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Dokumen kuesioner telah disusun bersama dengan OMS dan telah dibuka kepada OMS secara terbatas.	Aktif
Indonesia Corruption Watch (ICW)		
Target B06: Review Indikator Pengadaan Barang/Jasa untuk Monev	Capaian Target: Mengikuti FGD yang dilaksanakan oleh KIP untuk evaluasi terhadap pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik pada Februari 2023.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Semi-Aktif

Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan masyarakat sipil	Ko-kreasi telah dilaksanakan dengan mengundang berpartisipasi pada FGD untuk evaluasi terkait pelaksanaan monev. Akan tetapi, monev dan indikatornya saat ini sudah diedarkan dan tidak bisa diubah sehingga pembahasan mengenai indikator pengadaan barang/jasa di monev keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sipil.	
Target B12:	Capaian Target: -	Nilai: -
Tidak ada target	Proses Ko-kreasi: -	-
Tindak Lanjut B18: Ukuran Keberhasilan 1: LKPP dapat melanjutkan publikasi komponen informasi transaksi e-katalog berdasarkan hasil rapat pembahasan yang dilakukan pada B06. Ukuran Keberhasilan 2: LKPP dapat melakukan penyesuaian informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan pada LPSE berdasarkan pembahasan yang sebelumnya dilakukan pada B06. Ukuran Keberhasilan 3: LKPP dapat menambah keterlibatan partisipasi inspektorat pada sistem e-pengaduan. Selain itu, OMS dapat terus mendorong pendampingan kepada K/L/D dalam menggunakan sistem e-pengaduan. Ukuran Keberhasilan 4: Integrasi data BO dengan SIKAP dapat dilakukan untuk pencapaian target B18. Selain itu, OMS dapat menyelenggarakan forum diskusi kedua mengenai pengembangan database SIKAP dan indikator penilaiannya bersama dengan pemangku kepentingan terkait. Ukuran Keberhasilan 5: Pasca persiapan fitur dan kode unik, LKPP dapat memulai pengembangan fitur publikasi yang mengakomodir komponen informasi PBJ dan pengembangan kode unik berdasarkan hasil kesepakatan. OMS juga dapat melanjutkan koordinasi dengan LKPP terkait pengembangan kode unik, sebagaimana telah dimulai pada B06 dan dibahas lebih lanjut saat penyerahan hasil kajian OMS di B12. Ukuran Keberhasilan 6: OMS akan melanjutkan peningkatan kompetensi terkait pengawasan PBJ pemerintah serta melakukan penyusunan modul pengaduan PBJ bagi OMS. Dalam peningkatan kompetensi, OMS dapat melibatkan LKPP untuk menyampaikan materi terkait sebagai narasumber. Ukuran Keberhasilan 7: OMS akan menyelenggarakan FGD terkait Review Implementasi Monev Keterbukaan Informasi Publik terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam FGD tersebut, OMS dapat melibatkan KIP sebagai salah satu		

pemangku kepentingan terkait agar dapat memberikan masukan mengenai implementasi informasi PBJ Pemerintah menurut Perki 1/2021 dan memberikan update mengenai pengisian kuesioner indikator penilaian PBJ pemerintah dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik.

Komitmen 2

Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership

Ukuran Keberhasilan:		
Peningkatan Kualitas Data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership		
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK)		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing-Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018)	Telah dilakukan review terhadap regulasi, standar, dan struktur data BO oleh Stranas PK dengan Kementerian Hukum dan HAM yang sehubungan dengan pelaksanaan Revisi Perpres 13 Tahun 2018	
	Proses Ko-kreasi:	Aktif
	Dalam melakukan review telah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (PWYP Indonesia, Auriga, dan TI Indonesia)	
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing-Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018)	Pelaksanaan review terhadap regulasi Perpres 13 Tahun 2018 telah dilakukan kembali dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan penyempurnaan terhadap regulasi BO saat ini.	
	Proses Ko-kreasi:	Aktif
	Kemenkumham dan Stranas PK dalam melakukan review telah melibatkan OMS (PWYP Indonesia, Auriga, dan TI Indonesia).	
Kantor Staf Presiden, PPATK, Kemenkumham		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Laporan review Sectoral Risk Assessment (SRA) Data BO Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di	Kementerian/Lembaga telah mengeluarkan Laporan Sectoral Risk Assessment Data BO	
	Proses Ko-kreasi:	Aktif
	Proses Ko-kreasi telah berjalan dengan baik antara KPK dengan Organisasi Masyarakat Sipil	

Masing - Masing Institusi		
Target B12: Laporan review Sectoral Risk Assessment (SRA) Data BO Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing - Masing Institusi	Capaian Target: Korporasi risiko tinggi teridentifikasi: 3.289 (Sektor Konstruksi: 1.050; Investasi dan Keuangan: 1.695; Pertambangan dan distribusi: 544; Sektor Perdagangan: belum teridentifikasi)	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kegiatan telah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (PWYP Indonesia, Auriga, dan TI Indonesia)	Aktif
Kementerian ESDM, KLHK, Kementan, Kementerian ATR/BPN, KemenKOP dan UKM, Kemendag, Kemenkumham, Stranas -PK, BKPM, OJK, LKPP, Kemenkeu		
Target B06: Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing - Masing Institusi	Capaian Target: Korporasi risiko tinggi teridentifikasi: 3.559 (Sektor Konstruksi: 1.050; Investasi dan Keuangan: 1.965; Pertambangan dan distribusi: 544; Sektor Perdagangan: belum teridentifikasi) Pemadanan data telah dilakukan pada 883 data BO disektor konstruksi. Belum ada proses verifikasi	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kegiatan telah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (PWYP Indonesia, Auriga, dan TI Indonesia)	Aktif
Target B12: Pengumpulan Basis Data BO yang Terstandarisasi di Masing - Masing Institusi	Capaian Target:	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: telah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (PWYP Indonesia, Auriga, dan TI Indonesia)	Aktif
PWYP, ICW, dan Transparency International Indonesia		
Target B06: 1. Keterlibatan CSO dalam Review Terhadap	Capaian Target: Organisasi Masyarakat Sipil telah terlibat dalam diskusi pembahasan butir-butir revisi Permenkumham terkait tata cara Verifikasi Data	Nilai: 100%

Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing - Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018)	BO. OMS juga telah membuat laporan atau kajian terkait data BO korporasi dalam lingkup perusahaan sawit di Indonesia	
	Proses Ko-kreasi: Proses Ko-kreasi telah berjalan dengan baik antara KPK dengan Organisasi Masyarakat Sipil	Aktif
2. Penyusunan Kajian Kepatuhan Korporasi Dalam Deklarasi BO		
Target B12: 1. Keterlibatan CSO dalam Review Terhadap Regulasi, Standar, Struktur dan Kualitas Basis Data BO di Masing - Masing Institusi (Berdasarkan Perpres 13/2018) 2. Keterlibatan CSO dalam Cleansing Data BO yang Tersedia (Baik AHU maupun Institusi Lain) Dengan Data Legal Owner, Data NIK, NPWP	Capaian Target: PWYP telah terlibat dalam diskusi dan pelaksanaan cleansing data BO yang terdapat di Ditjen AHU dan K/L terkait lainnya	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Telah ada diskusi antar K/L terkait dengan PWYP untuk implementasi target capaian B12.	Aktif
Tindak Lanjut B18: 1. Pembahasan terkait revisi aturan terkait Beneficial Ownership perlu segera untuk dilakukan untuk menyempurnakan aturan terkait BO tersebut.		

2. Keterlibatan OMS perlu untuk terus didorong di dalamnya untuk menghasilkan Keterbukaan Data BO yang partisipatif.

Komitmen 3

Perlindungan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup

Ukuran Keberhasilan:		
Penyusunan Kajian Rekomendasi Kepastian Perlindungan Hukum Bagi Pembela Lingkungan		
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia		
Target B06	Capaian Target:	Nilai: 0%
1. Memberikan masukan atas data ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan yang merupakan basis data penyusunan outline kajian 2. FGD yang membahas mengenai ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan	Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 50%
Memberikan masukan atas data kejadian ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan	Auriga telah menerima masukan dari Komnas HAM atas kajian yang disusun dan data yang dibutuhkan untuk melengkapi kajian, yakni data aduan Komnas HAM RI tahun 2023. Namun, Auriga masih membutuhkan data aduan tahun 2022 dari Komnas HAM untuk melengkapi kajian lebih lanjut.	
	Proses Ko-kreasi: Berdasarkan data dukung yang telah dikumpulkan Auriga, Komnas HAM telah menghadiri beberapa pertemuan yang diselenggarakan oleh Auriga untuk	Semi-aktif

	membahas tindak lanjut mengenai data kejadian ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan. Namun, ko-kreasi dapat ditingkatkan agar ada kerja sama lebih bermakna antara kedua pihak.	
Kepolisian Republik Indonesia		
Target B06: Menerima data mengenai peristiwa yang dianggap sebagai ancaman terhadap pembela lingkungan	Capaian Target: Kepolisian telah menerima data Auriga Nusantara mengenai peristiwa terkait ancaman terhadap pembela lingkungan dengan memberikan pula database dari tahun 2014 hingga April 2023 terdapat 107 kasus ancaman terhadap pembela lingkungan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kepolisian telah turut serta dalam menelaah data yang dihimpun Auriga dan memberikan rekap database yang kemudian menjadi basis data yang ditampilkan di dalam sesi diskusi ancaman terhadap pembela lingkungan pada OG Week 2023. Kepolisian juga telah melakukan inisiatif ko-kreasi dengan menjadi narasumber dalam sesi diskusi tersebut.	Aktif
Target B12: Menganalisa dan mengevaluasi perkara yang menjadikan ancaman terhadap pembela lingkungan	Capaian Target: Kepolisian RI sudah melakukan analisa pada B06, dan analisa tersebut masih cukup untuk menjadi masukan bagi Auriga di Semester II.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kepolisian telah turut serta dalam menelaah data yang dihimpun Auriga dan memberikan rekap database yang kemudian menjadi basis data yang ditampilkan di dalam sesi diskusi ancaman terhadap pembela lingkungan pada OG Week 2023.	Aktif
Auriga Nusantara		
Target B06	Capaian Target: Auriga telah melakukan ko-kreasi dengan mengundang Kepolisian dan Komnas HAM terlibat	Nilai: 100%

1. Tersedianya masukan mengenai data ancaman yang dialami oleh pembela lingkungan	sebagai narasumber dalam sesi diskusi kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan. Rapat koordinasi juga dilaksanakan beberapa kali antar keduanya dalam pembahasan database ancaman terhadap pembela lingkungan dan outline terkait kajian kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan.	
2. Keterlibatan dalam FGD dan penyusunan outline kajian kepastian perlindungan hukum bagi pembela lingkungan	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan dengan pelibatan Kepolisian dan Komnas HAM dalam FGD yang diselenggarakan Auriga bersama Setnas OGI di OG Week 2023.	Aktif
Target B12: Tersedianya masukan mengenai data kejadian ancaman dan literatur pendukung kajian	Capaian Target: Auriga telah menerima masukan dari Komnas HAM atas kajian yang disusun dan data yang dibutuhkan untuk melengkapi kajian, yakni data aduan Komnas HAM RI tahun 2023. Namun, Auriga masih membutuhkan data aduan tahun 2022 dari Komnas HAM untuk melengkapi kajian lebih lanjut.	Nilai: 75%
	Proses Ko-kreasi: Auriga telah menyelenggarakan beberapa pertemuan informal dengan Komnas HAM untuk mendapatkan masukan atas data. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Auriga akan mengadakan FGD resmi dengan berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan Kepolisian RI. Pada periode B12, Auriga belum melakukan ko-kreasi dengan Kepolisian RI.	Semi-aktif
Tindak Lanjut B18: 1. Auriga akan membuat FGD untuk membahas muatan kajian lebih lanjut dengan beberapa pihak, termasuk Komnas HAM dan Kepolisian RI. 2. Auriga masih membutuhkan data mengenai aduan yang diterima pada tahun 2022 dari Komnas HAM untuk melengkapi kajian.		

3. Kepolisian RI dapat mengumpulkan data dukung mengenai analisa dan evaluasi perkara yang menjadikan ancaman terhadap pembela lingkungan.

Komitmen 4

Mengawal Perumusan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Ukuran Keberhasilan 1:		
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L		
Kementerian Komunikasi dan Informatika		
Target B06 Tidak ada target untuk periode B06.	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: 1. Konsultasi publik untuk menjangkau masukan publik terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga PDP dengan K/L terkait 2. Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif

Yayasan TIFA		
Target B06: Tidak ada target untuk periode B06.	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: 1. Keterlibatan dalam konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L 2. Tersedianya rekomendasi pengaturan mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L	Capaian Target: TIFA telah memberikan masukan terkait dengan Peraturan Turunan RUU PDP melalui portal masukan yang disediakan oleh Kemenkominfo.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Berdasarkan data dukung yang dikumpulkan, belum terlihat ada ko-kreasi yang terjalin antara Kominfo dan Yayasan TIFA.	Pasif
Ukuran Keberhasilan 2: Diterimanya Rekomendasi Peraturan Turunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai Pengendali Data Gabungan dari Masyarakat Sipil		
Kementerian Komunikasi dan Informatika		

Target B06 Keterlibatan dengan memberikan masukan atas kajian partisipatoris untuk proses penyusunan rekomendasi rancangan peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	Capaian Target: Telah memberikan masukan terhadap kajian partisipatoris yang dilakukan oleh Tifa terkait rekomendasi rancangan peraturan turunan pengendali data gabungan.	Nilai: 70%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan antara Kominfo dengan Yayasan TIFA	Aktif
Target B12: Tidak ada target	Capaian Target: -	Nilai: -
	Proses Ko-kreasi: -	
Yayasan TIFA		
Target B06: Penyelenggaraan penyusunan kajian partisipatoris untuk proses penyusunan rekomendasi peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	Capaian Target: Kajian partisipatoris telah disusun substansi rekomendasi ditujukan dalam konteks peraturan turunan pengendali data gabungan. Meskipun belum ada peraturan turunan dari UU PDP yang membahas mengenai pengendalian data pribadi, rekomendasi pengendali data pribadi disesuaikan dengan konteks Indonesia dalam UU PDP yang cukup terbatas.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi telah dilaksanakan melalui keterlibatan Kominfo dalam penyusunan kajian partisipatoris yang TIFA lakukan.	Aktif
Target B12: Penyelenggaraan kajian partisipatoris untuk menyusun	Capaian Target: Kajian partisipatoris telah disusun dan diselesaikan pada B06	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Aktif

rekomendasi peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan	Ko-kreasi sudah dijalankan pada periode B06 saat kajian sedang disusun	
Ukuran Keberhasilan 3: Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri		
Kementerian Komunikasi dan Informatika		
Target B06: 1. Konsultasi publik untuk menjangkau masukan publik terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai peran lembaga PDP dalam pengaturan transfer data ke luar negeri terlaksana 2. Tersedianya masukan atas rencana kajian yang akan dilakukan	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Target B12: Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%

mengenai lembaga PDP	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Yayasan TIFA		
Target B06: Tidak ada target untuk periode B06.	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: 1. Keterlibatan dalam konsultasi publik untuk memberikan masukan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur terkait peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri 2. Tersedianya rekomendasi	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif

pengaturan peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri		
Ukuran Keberhasilan 4: Keterlibatan dalam forum diskusi multipihak dalam membahas perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP		
Kementerian Komunikasi dan Informatika		
Target B06: Tidak ada target untuk periode B06.	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: Keterlibatan dalam pembahasan mengenai perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Yayasan TIFA		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 0%

Terlaksananya penjangkaran masukan dari kelompok masyarakat sipil dan sektor privat mengenai proses dan substansi peraturan pelaksana UU Perlindungan Data Pribadi	Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Target B12: Terlaksananya forum diskusi pertama dengan melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Tindak Lanjut B18: <p>Secara keseluruhan, ko-kreasi antara Kemenkominfo dan Yayasan TIFA perlu ditingkatkan untuk capaian komitmen ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat Nasional OGI akan memfasilitasi pertemuan antar Kemenkominfo dan Yayasan TIFA untuk membahas tindak lanjut capaian B18-B24. Selain itu, Kemenkominfo dan Yayasan TIFA dapat meningkatkan pelaporan mengenai hasil implementasi komitmen, baik saat periode pengumpulan data dukung monitoring dan evaluasi maupun saat implementasi, agar Sekretariat Nasional OGI dan masing-masing pemangku kepentingan dapat mengikuti perkembangan implementasi komitmen dengan lebih baik.</p> <p>Adapun rekap dari target yang harus tercapai pada B18 sebagai berikut:</p> <p>Ukuran Keberhasilan 1: Kemenkominfo perlu melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur mekanisme koordinasi antara Lembaga PDP dengan K/L. Selain itu, pada uji publik mengenai Rancangan</p>		

Peraturan Pemerintah tersebut, Yayasan TIFA dapat terlibat untuk memberikan masukan.

Ukuran Keberhasilan 2: Pasca terselenggaranya kajian partisipatoris, Yayasan TIFA perlu melakukan penyusunan rekomendasi rancangan peraturan turunan mengenai pengendali data gabungan dan melibatkan Kemenkominfo dalam proses penyusunan rekomendasi tersebut. Kemenkominfo dapat terlibat dalam memberikan rekomendasi antara lain sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi yang membahas penyusunan muatan rekomendasi.

Ukuran Keberhasilan 3: Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Lembaga PDP yang mengatur peran Lembaga PDP dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar negeri sudah perlu tersedia pada B18. Selain itu, pada uji publik mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, Yayasan TIFA dapat terlibat untuk memberikan masukan.

Ukuran Keberhasilan 4: Yayasan TIFA perlu membuat forum diskusi yang melibatkan pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil, termasuk Kemenkominfo agar Kemenkominfo dapat menyampaikan perkembangan proses penyusunan peraturan pelaksana UU PDP.

Komitmen 5

Penyusunan Mekanisme Penanganan Pemilu dari Disinformasi

Ukuran Keberhasilan 1:		
Tersusunnya mekanisme penanganan pengaduan disinformasi dalam Pemilihan Umum		
Badan Pengawasan Pemilihan Umum		
Target B06	Capaian Target:	Nilai: 100%
Adanya draft mekanisme penanganan panduan Disinformasi dalam Pemilu 2024	Bawaslu telah membuat mekanisme penanganan disinformasi Pemilu melalui platform "Jarimu Awasi Pemilu." Platform tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk melaporkan disinformasi terkait dengan Pemilu. Dalam melakukan verifikasi terkait disinformasi tersebut, Bawaslu juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Swasta (penyedia sosial media).	
	Proses Ko-kreasi:	Aktif
	Bawaslu telah melibatkan KOPEL untuk mendiskusikan terkait mekanisme penanganan disinformasi Pemilu.	
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
Mekanisme penanganan pengaduan disinformasi disetujui oleh Ketua Bawaslu	Bawaslu telah menyusun mekanisme pengaduan Disinformasi melalui Kanal Jarimu Awasi Pemilu. Mekanisme juga disusun dengan melakukan kerja sama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia	
	Proses Ko-kreasi:	Aktif
	Bawaslu telah mengimplementasikan target capaian B12 dengan pelibatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia.	
Komite Pemantau Legislatif		
Target B06:	Capaian Target:	Nilai: 100%
- Audiensi untuk menyampaikan policy brief	KOPEL telah melakukan Audiensi untuk menyampaikan Policy brief mengenai penanganan pengaduan disinformasi dalam Pemilu. Audiensi	

<p>pentingnya panduan penanganan pengaduan disinformasi dalam Pemilu</p> <p>- Adanya poin-poin masukan untuk mekanisme penanganan pengaduan disinformasi</p>	<p>sudah dilakukan kepada unit kerja terkait dengan staff ahli komisioner Bawaslu.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>KOPEL telah berinisiatif membangun Ko-kreasi dengan Bawaslu, dan upaya tersebut diterima baik Bawaslu dengan bentuk diadakannya Audiensi sebanyak dua kali antara KOPEL dan Bawaslu.</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>Hasil review rancangan awal mekanisme pengaduan disampaikan kepada komisioner Bawaslu</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>KOPEL dan Bawaslu telah menyusun pedoman terkait dengan mekanisme disinformasi Pemilu melalui portal Jarimu Awasi Pemilu.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>KOPEL dan Bawaslu sudah melakukan ko-kreasi untuk pencapaian target B12.</p>	Aktif
<p>Ukuran Keberhasilan 2:</p> <p>Pelaksanaan Forum Multistakeholder dalam penyusunan mekanisme penanganan pengaduan disinformasi</p>		
<p>Badan Pengawasan Pemilihan Umum</p>		
<p>Target B06</p> <p>Keterlibatan dalam Forum Multistakeholder dalam rangka Penyusunan Mekanisme Penanganan Disinformasi Pemilu</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Bawaslu telah terlibat dalam Forum Multistakeholder yang diselenggarakan oleh KOPEL. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu menerima usulan serta masukan dari OMS terkait mekanisme penanganan disinformasi Pemilu.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Bawaslu telah menerima rekomendasi dari KOPEL dan unsur OMS terkait dengan usulan proses atau mekanisme penanganan disinformasi Pemilu</p>	Aktif

Target B12: Keterlibatan dalam Forum Multistakeholder dalam rangka Penyusunan Mekanisme Penanganan Disinformasi Pemilu	Capaian Target: Bawaslu telah menghadiri dan melakukan komunikasi dengan berbagai unsur Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam melakukan dan menyusun mekanisme penanganan Disinformasi Pemilu.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Bawaslu dan OMS telah melakukan ko-kreasi dalam Forum Multipihak dalam rangka penyusunan mekanisme penanganan Disinformasi Pemilu.	Aktif
Komite Pemantau Legislatif		
Target B06: Memfasilitasi Forum multistakeholder memberikan masukan pada draft mekanisme penanganan pengaduan disinformasi	Capaian Target: KOPEL telah memfasilitasi pertemuan untuk memberikan masukan dan draft penanganan kepada Bawaslu. Selanjutnya Bawaslu diharapkan dapat menindaklanjuti masukan dari KOPEL.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Inisiatif Proses Ko-kreasi telah dilakukan oleh KOPEL dengan Bawaslu.	Aktif
Target B12: Memfasilitasi Forum multistakeholder memberikan masukan pada draf akhir mekanisme penanganan pengaduan disinformasi	Capaian Target: Telah dilakukan FGD dengan Bawaslu terkait mekanisme penanganan Hoax.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Telah terselenggara ko-kreasi antara Bawaslu, KOPEL, dan Koalisi CSO lainnya yang bergerak di isu pemilihan umum.	Aktif
Tindak Lanjut B18: <ul style="list-style-type: none"> - KOPEL dapat mendukung platform Jarimu Awasi Pemilu melalui kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat 		

- Bawaslu dapat mendorong publikasi dan sosialisasi aplikasi Jarimu Awasi Pemilu dan meningkatkan peran aplikasi tersebut dalam menangani kasus penanganan disinformasi dalam Pemilu.

Komitmen 6

Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum

Ukuran Keberhasilan:		
Tersedianya Data Pemilu dalam format data terbuka (<i>open data</i>)		
Komisi Pemilihan Umum (KPU)		
Target B06 1. Tersedianya Data Profil Partai Politik Peserta Pemilu (SIPOLE) 2. Tersedianya data peta daerah pemilihan dalam format data terbuka (SIDAPIL)	Capaian Target: KPU telah membuka Informasi Partai Politik dan Informasi Peta Daerah Pemilihan (DAPIL). Portal tersebut dapat diakses oleh publik melalui portal info pemilu.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: KPU telah melakukan Ko-kreasi dengan Perludem terkait dengan jenis dan format data yang dibutuhkan terkait dengan SIPOLE dan SIDAPIL 2024.	Aktif
Target B12: Tersedianya Data Peserta Pemilu (Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD) dalam format data terbuka (SILON)	Capaian Target: Data Peserta Pemilu Legislatif dan Eksekutif telah dibuka oleh KPU melalui portal Info Pemilu. Adapun link untuk mengakses informasi terkait sistem pencalonan dapat dibuka melalui link berikut: DPR: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr DPRD Provinsi: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprprov DPRD Kab/Kota: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd Presiden - Wakil Presiden: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Pwp/Pengundian_nomor_urut	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Pasif

	Berdasarkan data dukung yang dikumpulkan, belum terlihat apakah ada ko-kreasi yang terjadi antara KPU dan Perludem.	
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)		
Target B06: Terselenggaranya workshop dengan penyelenggara Pemilu dan Masyarakat Sipil untuk menyusun rekomendasi jenis-jenis data dalam setiap dataset Pemilu	Capaian Target: Perludem telah melaksanakan workshop dengan OMS. Workshop dilakukan untuk menjangkau masukan terkait pentingnya keterbukaan data pemilihan umum serta tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan keterbukaan data Pemilihan Umum. Namun workshop belum dilakukan bersama dengan penyelenggara pemilu, sehingga masukan belum dapat diterima oleh penyelenggara Pemilu.	Nilai: 80%
	Proses Ko-kreasi: Proses Ko-kreasi antara KPU dan Perludem belum terlihat. Belum ada kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan keterbukaan data Pemilihan Umum.	Aktif
Target B12: Terselenggaranya workshop dengan masyarakat sipil dan komunitas teknologi untuk menyusun rekomendasi strategi penyediaan serta pemanfaatan data Pemilu	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Tindak Lanjut B18: <ul style="list-style-type: none"> - Perludem dapat mengumpulkan data dukung untuk melaksanakan ketercapaian B12. - KPU dan Perludem perlu untuk meningkatkan Ko-kreasi lebih aktif untuk memastikan ketercapaian pelaksanaan Target Capaian merupakan hasil dari proses ko-kreasi. 		

Komitmen 7

Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Ukuran Keberhasilan:		
Tersusunnya pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital		
Kementerian Komunikasi dan Informatika		
Target B06 Merumuskan pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital	Capaian Target: Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan perumusan Pedomann Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas melalui kegiatan pemetaan permasalahan dan gambaran singkat kondisi aksesibilitas digital di Indonesia.	Nilai:100%
	Proses Ko-kreasi: Kominfo telah melakukan ko-kreasi secara Aktif bersama dengan Suarise untuk memastikan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pemetaan permasalahan serta mendeskripsikan gambaran singkat kondisi aksesibilitas digital di Indonesia.	Aktif
Target B12: Menyusun pedoman Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas termasuk aksesibilitas digital	Capaian Target: Kominfo telah menyusun Pedoman LKIP bersama dengan Suarise secara Ko-kreasi. Dapat dilakukan penelaahan lebih lanjut terkait pedoman dan mendorong implementasi dari Pedoman LKIP Penyandang Disabilitas.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Penyusunan Pedoman LKIP telah dilakukan bersama-sama oleh Kominfo dan Suarise.	Aktif
Suarise		

Target B06: Melakukan penyusunan pemetaan permasalahan dan gambaran singkat terkait kondisi aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas	Capaian Target: Suarise telah melakukan pemetaan mengenai permasalahan dan gambaran singkat terkait kondisi aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas.	Nilai:100%
	Proses Ko-kreasi: Suarise dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan ko-kreasi melalui penyelenggaraan pemetaan permasalahan secara kolaboratif. Kedepannya diharapkan proses ko-kreasi dapat berlanjut sampai penyusunan kebijakan.	Aktif
Target B12: Keterlibatan dalam penyusunan panduan/ petunjuk teknis terkait aksesibilitas digital bagi kelompok disabilitas	Capaian Target: Suarise dan Kominfo sudah menyusun Pedoman LKIP Aksesibilitas Digital secara ko-kreasi. Suarise juga mengumpulkan data dukung berupa notulensi dan dokumentasi rapat pembahasan pedoman LKIP dan bahan paparan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Suarise dan Kominfo sudah melakukan ko-kreasi aktif untuk menyusun pedoman.	Aktif
Tindak Lanjut B18: <ul style="list-style-type: none"> - Kominfo bersama Suarise perlu untuk segera menetapkan Pedoman yang disusun secara resmi. - Pedoman LKIP Aksesibilitas Digital dapat disusun dalam Peraturan Menteri terkait atau melakukan sosialisasi dan pilot projecting kepada K/L atau Pemda terkait. 		

Komitmen 8

Akuntabilitas Sosial Keterbukaan Anggaran Desa

Ukuran Keberhasilan 1:		
Publikasi APBDes dan pertanggungjawaban APBDes melalui website desa		
Kementerian Dalam Negeri		
Target B06 Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa	Capaian Target: Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sosialisasi terkait dengan keuangan desa kepada aparatur desa. Selain itu Kementerian Dalam Negeri turut berpartisipasi dalam kegiatan penguatan transparansi pemerintah desa bersama dengan Transparency International Indonesia (TI Indonesia).	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Transparency International Indonesia telah berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi penguatan transparansi anggaran pemerintahan desa.	Aktif
Target B12: Tidak ada target	Capaian Target: -	Nilai: -
	Proses Ko-kreasi: -	
Transparency International Indonesia		
Target B06: 1. Pendampingan aparat desa dalam penguatan keterbukaan informasi publik	Capaian Target: TI Indonesia telah melakukan pendampingan kepada aparat desa berkaitan dengan penguatan keterbukaan informasi publik. Kegiatan dilakukan dalam bentuk webinar yang mengundang dan dihadiri oleh 15 perwakilan desa pilot project di Aceh, Jember, dan Kabupaten Kupang.	Nilai: 100%

2. Peningkatan kapasitas aparat desa	Proses Ko-kreasi: Kegiatan pendampingan kepada aparat desa dilakukan secara ko-kreasi oleh TI Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri	Aktif
Target B12: 1. Pendampingan aparat desa dalam penyusunan daftar informasi publik dan klasifikasi informasi publik 2. Pendampingan aparat pemerintah desa dalam penyusunan rencana belanja pengadaan barang dan jasa desa	Capaian Target: 1. TI Indonesia sudah melakukan pendampingan perangkat desa dalam melakukan penyusunan klasifikasi informasi publik di tingkat desa. Pasca pendampingan tersebut, perangkat desa melakukan penyusunan daftar informasi publik di desa. 2. TI Indonesia telah melakukan pendampingan penyusunan APBDes	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: TI Indonesia telah melakukan ko-kreasi dengan perangkat desa.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Penguatan warga dalam pengawasan keuangan desa		
Kementerian Dalam Negeri		
Target B06 Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa.	Capaian Target: Tidak teridentifikasi bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh Kemendagri	Nilai: N/A
	Proses Ko-kreasi: Tidak teridentifikasi bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh Kemendagri	N/A
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat dan pendamping desa	Kemendagri telah melakukan pendampingan kepada Aparatur Pemerintahan Desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa.	
	Proses Ko-kreasi: Belum terlihat proses Ko-kreasi Kementerian Dalam Negeri dengan OMS.	Pasif
Transparency International Indonesia		
Target B06: Adanya kelompok masyarakat yang aktif mengawasi keuangan desa	Capaian Target: TI Indonesia telah mendampingi 15 Desa di Jember, Kupang dan Aceh untuk membentuk kelompok masyarakat yang aktif untuk mengawasi keuangan desa. Kelompok masyarakat tersebut terdiri dari 45 Pemuda untuk 15 Desa di masing-masing wilayah. TI Indonesia juga telah melakukan pelatihan mengenai bagaimana cara atau proses mengawasi keuangan desa.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: TI Indonesia perlu melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan bentuk fasilitasi yang diperlukan, baik untuk Target Capaian Semester 1 dan Semester 2.	Pasif
Target B12: Tersedianya modul pemantauan sistem keuangan desa	Capaian Target: TI Indonesia telah menyusun modul akuntabilitas sosial pengelolaan keuangan desa, yang disusun melalui kolaborasi antara TI Indonesia dan mitra jaringan di Aceh, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Jember. Penyusunan modul ini telah melalui tahapan diskusi dengan para ahli, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan perwakilan Kemendes PDTT	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Penyusunan modul telah melibatkan perwakilan K/L/D secara aktif.	Aktif
Tindak Lanjut B18:		

TI Indonesia perlu mendorong keterlibatan Kemendagri dalam kegiatan mendorong partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran desa.

Komitmen 9

Akuntabilitas Sosial Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Ukuran Keberhasilan 1:		
Implementasi akuntabilitas sosial dalam proses musyawarah desa		
Kemendes PDDT		
Target B06 Persiapan Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	Capaian Target: Kementerian Desa PDDT telah melakukan sosialisasi terkait Akuntabilitas Sosial Pemerintah Desa melalui program-program Sekolah Lapang. Kemendesa PDDT juga telah menerima audiensi WVI mengenai penyusunan kajian dan petunjuk teknis terkait dengan Musyawarah Desa.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi dengan WVI belum terlihat. Namun sudah melakukan Ko-kreasi dengan OMS lain, seperti Lakpesdam dan Kemitraan . Kementerian Desa PDDT juga telah menerima audiensi WVI dalam rangka penyusunan kajian mengenai akuntabilitas sosial.	Aktif
Target B12: Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	Capaian Target: Kementerian Desa PDDT telah melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait dengan replikasi P3PD Subkomponen 2B kepada Pemerintah Desa.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kemendesa PDDT dan WVI akan melakukan Diseminasi Kajian Inisiasi Akuntabilitas Sosial dalam Musyawarah Desa pada 31 Januari 2024.	Aktif
Wahana Visi Indonesia		
Target B06: 1. Tersedianya kajian & Juknis akuntabilitas	Capaian Target: <ul style="list-style-type: none"> Wahana Visi Indonesia (WVI) telah melaksanakan audiensi dengan Kemendesa PDDT mengenai kajian dalam musyawarah 	Nilai: 100%

<p>sosial dalam musyawarah desa.</p> <p>2. Diadakannya dialog/diskusi publik mengenai akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa</p>	<p>desa. Berdasarkan hasil pertemuan, Kemendesa PDTT siap membantu dalam penyusunan kajian tersebut. Selain itu WVI juga telah menyusun draft kajian mengenai Musyawarah Desa. Petunjuk teknis akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa belum dilaksanakan dan disusun oleh WVI.</p> <ul style="list-style-type: none"> WVI telah melakukan dialog dan diskusi mengenai musyawarah desa dengan masyarakat desa di Kabupaten Ende, Ngada, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. 	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>WVI telah menyelenggarakan diskusi dengan Kementerian Desa PDTT dalam menyusun kajian dan juknis terkait akuntabilitas sosial dalam musyawarah desa.</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>Sosialisasi dan pelatihan Juknis Akuntabilitas Sosial dalam Musyawarah Desa.</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah dilakukan pendampingan kepada daerah tertentu, tetapi untuk peluncuran masih menunggu jadwal.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Kemendesa PDTT dan WVI akan melakukan Diseminasi Kajian Inisiasi Akuntabilitas Sosial dalam Musyawarah Desa pada 31 Januari 2024.</p>	Aktif
<p>Ukuran Keberhasilan 2:</p> <p>Implementasi metode Program Review dalam proses pembangunan pemerintah di tingkat desa</p>		
<p>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</p>		
<p>Target B06</p> <p>Persiapan Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Kemendesa PDTT telah melakukan sosialisasi terkait Akuntabilitas Sosial Pemerintah Desa melalui program-program Sekolah Lapang</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Belum terdapat Ko-kreasi antara Kemendesa PDTT dengan Yayasan TIFA karena tidak adanya pelibatan dalam kegiatan Program</p>	N/A

	Review	
Target B12: Sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa	Capaian Target: Telah dilaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi Akuntabilitas Sosial dan Pemerintah Desa, antara lain Rapat Sosialisasi dan Diseminasi P3PD Subkomponen 2B (24-26 Oktober 2023) dan Workshop Replikasi P3PD Sub Komponen 2B (6-8 November 2023).	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Belum terlihat proses Ko-kreasi Kemendesa PDTT dengan Yayasan TIFA.	Pasif
Yayasan TIFA		
Target B06: Tersedianya peraturan di tingkat desa yang mendukung dan mengesahkan pelaksanaan Program Review sebagai metode mendukung Akuntabilitas Sosial	Capaian Target: Yayasan TIFA telah mendampingi Desa Sriharjo dan Desa Guwosari dalam menyusun Peraturan Desa mengenai Pelaksanaan Program Review pada kedua desa tersebut. Peraturan tersebut telah selesai disusun dan dipublikasikan	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Belum terlihat proses Ko-kreasi yang dilakukan Yayasan TIFA dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.	Pasif
Target B12: 1. Sosialisasi akuntabilitas sosial pada area non uji coba. 2. Tercapainya akuntabilitas sosial program pemerintah menggunakan metode Program Review.	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif

3. Terlaksananya uji coba Program Review sebagai metode alternatif akuntabilitas sosial di tingkat Kabupaten.		
<p>Tindak Lanjut B18:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Keberhasilan 1: Sekretariat OGI akan membantu untuk menyesuaikan dan memfasilitasi kegiatan rapat. 2. Ukuran Keberhasilan 2: Yayasan TIFA dapat mengumpulkan data dukung untuk melaksanakan ketercapaian B12. Sekretariat OGI juga akan memfasilitasi pertemuan antar Kemendesa PDTT dan OMS. 		

Komitmen 10

Terlaksananya Proses Penyusunan RUU KKR untuk Memenuhi Hak atas Kebenaran

Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya Naskah Akademik (NA) RUU KKR sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu		
BPHN Kementerian Hukum dan HAM		
Target B06: Tidak ada target untuk periode B06.	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, KontraS Aceh		
Ukuran Keberhasilan 2: Adanya <i>policy paper</i> mengenai KKR dari masyarakat sipil sebagai salah satu dasar pemikiran untuk mendukung kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu		
Target B06: Adanya proses penyusunan <i>policy paper</i> dari masyarakat sipil untuk mendukung penyusunan NA dan draf RUU KKR	Capaian Target: Telah dilakukan proses penyusunan <i>policy paper</i> “Usulan Pelembagaan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Membangun Mekanisme Pengungkapan Kebenaran untuk Pemulihan Korban”. Dokumen terdiri atas muatan mengenai prinsip-prinsip penghapusan impunitas, catatan dan refleksi kritis pelaksanaan di berbagai negara, dan usulan pembentukan	Nilai: 100%

	komite pengungkapan kebenaran dalam konteks Indonesia saat ini.	
	Proses Ko-kreasi: Kementerian/Lembaga, OMS dan masyarakat umum berdiskusi mengenai topik di kegiatan Open Government Week 2023, yang menjadi salah satu masukan untuk penulisan draf.	Aktif
Catatan Komitmen: Komitmen tidak dilanjutkan sehubungan dengan adanya upaya non-yudisial dari pemerintah atas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.		

Komitmen 11

Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan

Ukuran Keberhasilan 1: Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum		
Kejaksaan Agung		
Target B06: Terlaksananya peluncuran pedoman penanganan perkara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan	Capaian Target: Pada 30 Mei 2023, Jaksa Agung Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pedoman ini disusun secara ko-kreasi dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). Pedoman telah diluncurkan dan disosialisasikan pada 3 Agustus 2023.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kejaksaan Agung telah berkolaborasi secara dekat dengan IJRS mulai dari proses penyusunan, penetapan, hingga diskusi untuk peluncuran Pedoman.	Aktif
Target B12: Adanya penyusunan materi sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas	Capaian Target: Kejaksaan Agung sudah melakukan sosialisasi melalui diskusi yang diselenggarakan pada kegiatan Peluncuran Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu, Kejaksaan Agung telah membuat materi diklat mengenai	Nilai: 100%

berhadapan dengan hukum di Kejaksaan	penanganan perkara yang adil untuk penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yang juga akan memuat materi mengenai Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 2 Tahun 2023.	
	Proses Dalam penyusunan materi diklat, Kejaksaan Agung telah melibatkan Pusham UII Jogja.	Ko-kreasi: Aktif
Indonesia Judicial Research Society		
Target B06: Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum di Kejaksaan berdasarkan masukan dari masyarakat sipil	Capaian Target: Pada 30 Mei 2023, Jaksa Agung Republik Indonesia telah menetapkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam prosesnya, masyarakat sipil (IJRS dan SIGAB) terlibat dalam memberi masukan dan asistensi dari keseluruhan proses, serta terlibat dalam persiapan peluncuran Pedoman. Peluncuran Pedoman terjadwalkan pada 3 Agustus 2023.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kejaksaan Agung telah berkolaborasi secara dekat dengan IJRS mulai dari proses penyusunan, penetapan, hingga diskusi untuk peluncuran Pedoman.	Aktif
Target B12: Adanya penyusunan materi	Capaian Target: IJRS terlibat dalam sosialisasi Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 3 Tahun 2022	Nilai: 100%

sosialisasi dari peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum di Kejaksaan	melalui diskusi yang diselenggarakan pada peluncuran pedoman. IJRS belum dilibatkan dalam penyusunan materi diklat, namun Pusham UII selaku perwakilan OMS yang juga terlibat dalam implementasi komitmen ini sudah dilibatkan.	
	Proses Ko-kreasi: Kejaksaan Agung telah melibatkan IJRS dalam sosialisasi melalui kegiatan peluncuran. Selain itu, OMS yang juga terlibat dalam implementasi komitmen, Pusham UII, telah terlibat dalam penyusunan materi diklat.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Adanya monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan		
Kejaksaan Agung		
Target B06: Adanya diskusi awalan antara Kejaksaan dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Capaian Target: Telah dilaksanakan pertemuan konsultatif isu strategis akses keadilan di mana ukuran keberhasilan ini dikomunikasikan antar pihak, namun belum ada diskusi mengenai teknis pelaksanaan dan tindak lanjutnya.	Nilai: 75%
	Proses Ko-kreasi: Sudah ada upaya mengomunikasikan rencana melaksanakan ukuran keberhasilan ini pada pertemuan konsultatif akses keadilan, namun belum secara substansial membahas mengenai capaian ukuran keberhasilan. Harapannya, pertemuan konsultatif atau rapat lainnya pasca periode B06 dapat dimanfaatkan dengan lebih	Semi-Aktif

	optimal agar dapat terlaksana pembahasan lebih substansial atas capaian.	
Target B12: Adanya diskusi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Capaian Target: Kejaksanaan Agung mengumpulkan data dukung berupa rekapitulasi perkara tindak pidana umum di mana perempuan sebagai korban. Namun, diskusi mengenai alat ukur monitoring dan evaluasi bersama OMS belum terjadi. Diskusi akan diselenggarakan dengan fasilitasi Seknas OGI di bulan Februari 2024.	Nilai: 25%
	Proses Ko-kreasi: Belum terjadi diskusi dengan OMS untuk membahas alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan.	Pasif
Mahkamah Agung		
Target B06: Adanya diskusi awalan antara MA dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	Capaian Target: Mahkamah Agung dan OMS telah melakukan diskusi awalan mengenai latar belakang kegiatan monitoring dan evaluasi, kasus apa yang dapat dilakukan penilaian monitoring dan evaluasi, jenis data yang kira-kira dibutuhkan, dan tindak lanjut dari pertemuan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Mahkamah Agung telah mengundang OMS dalam pertemuan pembahasan pada 6 Juli 2023 dan menghadiri rapat konsultatif kluster akses terhadap keadilan untuk pembahasan lanjutan pada 10 Juli 2023.	Aktif
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Adanya diskusi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	<p>Pada tanggal 16 November 2023, Mahkamah Agung dan OMS telah melakukan diskusi mengenai rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PerMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, alat ukur yang akan digunakan, dan ruang lingkup perkara untuk monitoring dan evaluasi tersebut. Ruang lingkup dari perkara yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi PerMA Nomor 3 Tahun 2017 yakni perkara TPKS, perceraian, dan waris.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, akan ada diskusi mendalam mengenai kerangka dan alat ukur dengan tim kecil dari Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI di Januari 2024.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Mahkamah Agung dan OMS telah melakukan ko-kreasi aktif dalam membuat rencana implementasi monitoring dan evaluasi PerMA Nomor 3 Tahun 2017, antara lain melalui pelibatan aktif perwakilan OMS sebagai anggota dalam Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung.</p>	Aktif
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		
<p>Target B06:</p> <p>Adanya diskusi awalan antara Kejaksaan dan MA dengan OMS terkait rencana monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Dengan MA, OMS sudah melakukan diskusi awalan dengan Biro Perencanaan, dan akan dilakukan pertemuan dengan Pokja Perempuan dan Anak (Pokja PA) di mana IJRS tergabung di dalamnya pada Agustus 2023. Ke depannya, perlu ada komunikasi antar Biro Perencanaan, Pokja PA, dan OMS untuk melakukan sinkronisasi pembahasan</p>	<p>Nilai: 75%</p>

berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan	<p>dan strategi untuk melakukan monitoring dan evaluasi.</p> <p>Dengan Kejaksaan Agung, sudah ada upaya mengomunikasikan rencana melaksanakan ukuran keberhasilan ini pada pertemuan konsultatif akses keadilan, namun belum secara substansial membahas mengenai capaian ukuran keberhasilan.</p> <p>OMS juga telah membuat konsep alat ukur monitoring dan evaluasi, yang kedepannya akan dimintakan masukan kepada Pokja PA MA dan Pokja Akses Keadilan Kejaksaan.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>OMS telah mengupayakan diskusi antar Kejaksaan dan MA, meskipun diskusi dengan Kejaksaan untuk Ukuran Keberhasilan 2 Semester B06 saat ini masih belum membahas capaian secara substansial.</p>	Semi-Aktif
<p>Target B12:</p> <p>Adanya diskusi terkait alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di lembaga peradilan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Pada November 2023, IJRS dan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung telah melakukan pertemuan untuk pembahasan terkait rencana monitoring dan evaluasi terkait Perma No. 3 Tahun 2017. Dalam pertemuan tersebut, telah dipaparkan rencana monitoring dan evaluasi, serta diperoleh masukan untuk penajaman konsep monitoring & evaluasi. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mendiskusikan kerangka dan alat ukur secara lebih mendalam dengan tim kecil dari Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI.</p> <p>Terkait dengan diskusi bersama Kejaksaan, OMS berencana mengatur pertemuan pada Februari 2024.</p>	Nilai: 75%

	Proses Ko-kreasi: OMS dan Mahkamah Agung telah menjalankan ko-kreasi aktif pada B12. Ko-kreasi dengan Kejaksaan Agung belum terwujud pada B12 dan akan ditindaklanjuti pada awal B18.	Semi-Aktif
Ukuran Keberhasilan 3: Adanya evaluasi terhadap implementasi dari digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan		
Kejaksaan Agung		
Target B06: Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Capaian Target: Kejaksaan Agung telah memberikan tanggapan terhadap pemaparan kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kejaksaan Agung telah memberikan tanggapan terhadap hasil kajian OMS dalam pertemuan konsultatif isu strategis akses terhadap keadilan.	Aktif
Target B12: Adanya diskusi antara Kejaksaan Agung dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan temuan kajian OMS	Capaian Target: Pada bulan Juli, sudah ada rapat konsultatif untuk membahas implementasi komitmen akses terhadap keadilan, termasuk ukuran keberhasilan 3 komitmen 11. Ada beberapa poin tindak lanjut potensial yang dapat diangkat, namun belum ada pembahasan teknis lebih lanjut setelah pembahasan poin-poin tersebut.	Nilai: 25%
	Proses Ko-kreasi:	Pasif

	Pasca pertemuan di bulan Juli, tidak ada komunikasi rutin lagi mengenai captain komitmen ini, sehingga ko-kreasi dinilai pasif.	
Kepolisian Republik Indonesia		
Target B06: Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan	Capaian Target: Kepolisian RI telah terlibat dalam pembahasan awalan kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan pada bulan Januari 2023. Proses Ko-kreasi: Kepolisian RI telah terlibat dalam pembahasan yang diinisiasi oleh OMS.	Nilai: 100% Aktif
Target B12: Adanya diskusi antara Kepolisian RI dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan temuan kajian OMS	Capaian Target: Belum ada implementasi dari diskusi antara Kepolisian RI dan OMS mengenai usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan hasil temuan kajian OMS. Proses Ko-kreasi: Karena tidak ada diskusi yang diselenggarakan, ko-kreasi dinilai pasif.	Nilai: 0% Pasif
Mahkamah Agung		
Target B06: Adanya diskusi awalan untuk membahas hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses	Capaian Target: Mahkamah Agung telah menerima hasil kajian OMS dan memberikan tanggapan serta masukan atas kajian yang diterima. Proses Ko-kreasi: Mahkamah Agung dan OMS telah menjalankan diskusi awalan terhadap hasil	Nilai: 100% Aktif

peradilan bagi kelompok rentan	kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan oleh Mahkamah Agung.	
Target B12: Adanya diskusi antara MA dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan temuan kajian OMS	Capaian Target: Pada bulan Juli, sudah ada rapat konsultatif untuk membahas implementasi komitmen akses terhadap keadilan, termasuk ukuran keberhasilan 3 komitmen 11. Ada beberapa poin tindak lanjut potensial yang dapat diangkat, namun belum ada pembahasan teknis lebih lanjut setelah pembahasan poin-poin tersebut.	Nilai: 25%
	Proses Ko-kreasi: Pasca pertemuan di bulan Juli, tidak ada komunikasi rutin lagi mengenai capaian komitmen ini, sehingga ko-kreasi dinilai pasif.	Pasif
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		
Target B06: 1. Adanya diseminasi hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan 2. Adanya diskusi awalan antara OMS dengan Kejaksaan, Kepolisian RI dan MA mengenai hasil kajian OMS terkait implementasi digitalisasi proses	Capaian Target: OMS telah menyusun kajian berjudul "Kondisi Akses terhadap Keadilan untuk Perempuan dan Perempuan dari Kelompok Rentan Lain pada Masa Covid-19 di Indonesia", yang mencakup muatan mengenai implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan. Kajian ini lebih fokus terhadap Kepolisian RI dan Mahkamah Agung, namun juga memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan proses peradilan digital oleh APH secara keseluruhan, termasuk Jaksa. Hasil kajian ini sudah diseminasikan dan telah ada diskusi awalan dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung pada rapat konsultatif di 10 Juli 2023, dan dengan	Nilai: 100%

peradilan bagi kelompok rentan	Kepolisian secara terpisah pada bulan Januari.	
	Proses Ko-kreasi: Telah ada komunikasi antar pemangku kepentingan untuk pelaksanaan target capaian B06.	Aktif
Target B12: Adanya diskusi antara OMS dengan Kejaksaan, Kepolisian RI dan MA terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan oleh APH berdasarkan temuan kajian OMS	Capaian Target: Pada bulan Juli, sudah ada rapat konsultatif untuk membahas implementasi komitmen akses terhadap keadilan, termasuk ukuran keberhasilan 3 komitmen 11. Ada beberapa poin tindak lanjut potensial yang dapat diangkat, namun belum ada pembahasan teknis lebih lanjut setelah pembahasan poin-poin tersebut.	Nilai: 25%
	Proses Ko-kreasi: Pasca pertemuan di bulan Juli, tidak ada komunikasi rutin lagi dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung mengenai capaian komitmen ini. Selain itu, belum ada diskusi yang terjadi dengan Kepolisian RI pada B12.	Pasif
Tindak Lanjut B18: 1. Ukuran Keberhasilan 1: Adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan penyusunan materi Diklat (jika ada perubahan atas materi diklat yang dikumpulkan pada B12). 2. Ukuran Keberhasilan 2: <ul style="list-style-type: none"> Diskusi lebih mendalam mengenai kerangka dan alat ukur dengan tim kecil dari Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI. Perlu ada diskusi antar Kejaksaan Agung dengan OMS mengenai rencana monitoring dan evaluasi serta alat ukur dan data yang relevan untuk dikaji. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan atas Pedoman 		

Kejaksanaan 1/2021 mengenai Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

3. Ukuran Keberhasilan 3:

Perlu ada kesepakatan kembali antar pemangku kepentingan dan OMS mengenai tindak lanjut dari kajian mengenai implementasi digitalisasi proses peradilan. Sebagai contoh, salah satu hal yang dapat didorong sebagai tindak lanjut adalah FGD antar pemangku kepentingan untuk membuat alat ukur monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan untuk meninjau keberhasilan implementasi e-Court. Pasca MSF, Setnas OGI akan memfasilitasi diskusi antar pemangku kepentingan untuk menetapkan tindak lanjut yang dapat disepakati bersama-sama.

Komitmen 12

Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia

Ukuran Keberhasilan 1: Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum		
Badan Pembinaan Hukum Nasional		
Target B06: Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	Capaian Target: BPHN telah mengumpulkan data dukung berupa konsep Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum untuk bahan diskusi dengan OMS. Hal ini, beserta poin-poin yang BPHN ingin dapatkan masukan pada saat BPHN dan OMS nanti melakukan diskusi, telah dilaporkan dalam pertemuan konsultatif isu strategis akses terhadap keadilan pada tanggal 10 Juli 2023. Pada periode B06-B12, telah ada diskusi lanjutan mengenai pembentukan panduan asistensi penyusunan Stopela untuk PBH dan pemberian pelatihan bagi PBH untuk dapat melakukan penyusunan tersebut.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Diskusi sudah dilakukan oleh BPHN dan OMS	Aktif
Target B12: Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar	Capaian Target: Telah dilakukan diskusi mengenai pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Stopela Layanan Bantuan Hukum dan sosialisasi Permenkumham No. 4 Tahun 2021 mengenai Starlabankum yang	Nilai: 100%

Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum	<p>mewajibkan adanya penyusunan Stopela oleh PBH.</p> <p>Dari diskusi tersebut, salah satu tindak lanjut yang dibicarakan antara lain perlunya sosialisasi dan pelatihan yang lebih baik kepada OBH terlebih dahulu mengenai Starlabankum dan Stopela sebelum mewajibkan OBH menyusun Stopela. Hal tersebut akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Ko-kreasi dalam penyelenggaraan diskusi antara BPHN dan OMS berjalan dengan aktif.</p>	Aktif
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		
<p>Target B06:</p> <p>Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Pada periode B06-B12, telah ada diskusi lanjutan mengenai pembentukan panduan asistensi penyusunan Stopela untuk PBH dan pemberian pelatihan bagi PBH untuk dapat melakukan penyusunan tersebut.</p>	Nilai: 100%
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Diskusi sudah dilakukan oleh BPHN dan OMS</p>	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>Adanya diskusi antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela)</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Telah dilakukan diskusi mengenai pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Stopela Layanan Bantuan Hukum dan sosialisasi Permenkumham No. 4 Tahun 2021 mengenai Starlabankum yang mewajibkan adanya penyusunan Stopela oleh PBH.</p>	Nilai: 100%

Layanan Bantuan Hukum	Dari diskusi tersebut, salah satu tindak lanjut yang dibicarakan antara lain perlunya sosialisasi dan pelatihan yang lebih baik kepada OBH terlebih dahulu mengenai Starlabankum dan Stopela sebelum mewajibkan OBH menyusun Stopela. Sehubungan dengan hal tersebut, OMS telah membuat Materi Ajar Pelatihan Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum.	
	Proses Ko-kreasi: Ko-kreasi dalam penyelenggaraan diskusi antara BPHN dan OMS berjalan dengan aktif.	Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Adanya pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi terkait bantuan hukum.		
Badan Pembinaan Hukum Nasional		
Target B06: Adanya diskusi awalan antara BPHN dan OMS terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	Capaian Target: BPHN telah terlibat dalam diskusi awalan yang diselenggarakan OMS bersama dengan MA, dan memberikan informasi mengenai portal informasi yang ada di BPHN (Legal Smart Channel, Sidbankum), tantangan, dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat. BPHN juga telah melakukan pertemuan virtual dengan masyarakat sipil pelaksana komitmen untuk membahas pelaksanaan komitmen.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Aktif

	Telah ada diskusi awalan antar semua pelaksana komitmen, yang menghasilkan pemetaan umum terkait keadaan portal informasi bantuan hukum saat ini. Hal ini akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya untuk dapat memahami kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat dan potensi pengembangan portal secara lebih mendalam.	
Target B12: Tidak ada target	Capaian Target: -	Nilai: -
	Proses Ko-kreasi: -	
Mahkamah Agung		
Target B06: Adanya diskusi awalan antara MA dan OMS terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	Capaian Target: MA telah terlibat dalam diskusi awalan yang diselenggarakan OMS bersama dengan BPHN, dan memberikan informasi mengenai portal informasi yang ada di MA (Posbakum), tantangan dan praktik baik dari pelaksanaan, dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Telah ada diskusi awalan antar semua pelaksana komitmen, yang menghasilkan pemetaan umum terkait keadaan portal informasi bantuan hukum saat ini. Hal ini akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya untuk dapat memahami kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat dan potensi pengembangan portal secara lebih mendalam.	Aktif
Target B12:	Capaian Target: -	Nilai: -

Tidak ada target	Proses Ko-kreasi: -	
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		
Target B06: Adanya diskusi awalan antara OMS dengan BPHN dan MA terkait rencana pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap portal informasi bantuan hukum	Capaian Target: Diskusi awalan telah dilakukan kepada MA dan BPHN untuk menjelaskan rencana kajian pemetaan kebutuhan terhadap informasi bantuan hukum di Mahkamah Agung dan BPHN. Diperoleh berbagai masukan terhadap rencana kajian termasuk temuan untuk menganalisa kebutuhan akan informasi bantuan hukum melalui portal yang ada (Posbakum, Legal Smart Channel, Sidbankum). Selanjutnya OMS akan melanjutkan proses kajian dengan melakukan wawancara mendalam kepada BPHN dan MA untuk menganalisis lebih lanjut kebutuhan terhadap informasi bantuan hukum oleh masyarakat.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Telah ada diskusi awalan antar semua pelaksana komitmen, yang menghasilkan pemetaan umum terkait keadaan portal informasi bantuan hukum saat ini. Hal ini akan ditindaklanjuti pada periode berikutnya untuk dapat memahami kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat dan potensi pengembangan portal secara lebih mendalam.	Aktif
Target B12: Adanya diseminasi awal dari OMS terhadap hasil kajian terkait pemetaan kebutuhan hukum masyarakat terhadap	Capaian Target: OMS telah melakukan kajian mengenai kebutuhan masyarakat atas informasi bantuan hukum, dan mendiseminasikan temuan kajian kepada Mahkamah Agung dan BPHN. Diseminasi dan diskusi hasil kajian dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada	Nilai: 100%

portal informasi bantuan hukum	<p>tanggal 15 November 2023 (untuk membahas temuan awal kajian) dan tanggal 22 November 2023 (untuk mendiseminasikan kajian yang telah dipublikasi kepada publik).</p> <p>Diseminasi tanggal 15 November 2023 dihadiri oleh perwakilan Mahkamah Agung (Perwakilan Biro Perencanaan, Biro Humas, Badimiltun, Badilag dan Badilu), serta BPHN (Divisi Program Bantuan Hukum). Sementara, diseminasi tanggal 22 November 2023 yang dilakukan via Zoom menghadirkan perwakilan Biro Humas Mahkamah Agung dan perwakilan Divisi Program Bantuan Hukum BPHN sebagai Narasumber, beserta beberapa stakeholder relevan lainnya.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Target ini tercapai dengan ko-kreasi aktif antara OMS, BPHN dan Mahkamah Agung. Dalam penyusunan kajian dan pembahasannya, OMS aktif melibatkan BPHN dan Mahkamah Agung agar dapat menerima masukan atas riset yang dilakukan.</p>	Aktif
<p>Tindak Lanjut B18:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ukuran Keberhasilan 1: Perlunya dukungan anggaran dan kelembagaan BPHN yang lebih kuat, serta pengawasan dari BPHN untuk memastikan bahwa OBH memiliki pemahaman lebih baik mengenai Starlabankum dan Stopela, dan dapat melakukan penyusunan Stopela yang memadai sebagai bagian dari pemenuhan syarat verasi. Selain itu, BPHN dan OMS dapat mempertimbangkan untuk mengubah target capaian agar juga dapat mengakomodir adanya workshop yang melatih OBH menyusun Stopela secara lebih intensif. Ukuran Keberhasilan 2: Perlu ada diskusi lanjutan untuk menindaklanjuti pelaksanaan penguatan portal informasi, dan diskusi tersebut juga perlu membahas dukungan kelembagaan dan anggaran yang diperlukan agar perubahan dapat terwujud pasca adanya kesepakatan bersama mengenai rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. 		

Komitmen 13

Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia

Ukuran Keberhasilan 1: Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai masukan untuk Rancangan UU Bantuan Hukum (RUU Bankum)		
Badan Pembinaan Hukum Nasional		
Target B06: Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan	Capaian Target: Pasca pemetaan kebutuhan kelompok rentan oleh OMS pada 2022 dengan “Legal Needs Survey”, BPHN dan OMS telah melakukan diskusi lanjutan untuk usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan temuan survei, antara lain pada Open Government Week 2023 di tanggal 10 Mei 2023. Selain itu, temuan dari survei dan hasil diskusi telah disampaikan oleh BPHN dalam rapat perancangan Naskah Akademik RUU Bantuan Hukum. Selain itu, BPHN bersama dengan OMS pelaksana komitmen melakukan riset asesmen standar anggaran bantuan hukum dengan memetakan kebutuhan penerima bantuan hukum dari kelompok rentan dan biaya di luar biaya perkara yang kerap dikeluarkan pencari keadilan. Untuk melaksanakan kegiatan ini, BPHN dan OMS telah melakukan diskusi serta kunjungan lapangan di Jakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi bersama untuk menindaklanjuti temuan	Aktif

	mengenai kebutuhan hukum kelompok rentan serta kunjungan lapangan untuk melakukan asesmen standar anggaran bantuan hukum.	
Target B12: Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan	Capaian Target: Berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh BPHN dan OMS sebagai tindak lanjut survei kebutuhan hukum kelompok rentan (2022), salah satu rekomendasi yang akan ditindaklanjuti bersama mengenai asesmen anggaran bantuan hukum yang berperspektif kelompok rentan. Pada periode B06-B12, OMS pelaksana RAN bersama dengan YLBHI menjalankan advokasi dan penelitian untuk mengetahui kebutuhan anggaran bantuan hukum bagi pemberian bantuan hukum untuk kelompok rentan. Hasil penelitian tersebut menjadi acuan untuk diskusi-diskusi perubahan anggaran bantuan hukum yang diupayakan oleh BPHN dan OMS, dan akan dibahas lebih lanjut di internal BPHN pasca B12.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi dan kolaborasi aktif dalam menjalankan target, sehingga ko-kreasi dinilai aktif.	Aktif
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		
Target B06: Adanya diskusi antara OMS dan BPHN terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian	Capaian Target: Pasca pemetaan kebutuhan kelompok rentan oleh OMS pada 2022 dengan “Legal Needs Survey”, BPHN dan OMS telah melakukan diskusi lanjutan untuk usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan temuan survei, antara lain pada Open Government Week	Nilai: 100%

<p>OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan</p>	<p>2023 di tanggal 10 Mei 2023. Selain itu, OMS bersama BPHN melakukan koordinasi dan penyusunan ringkasan serta bahan yang dapat dibawa BPHN dalam pembahasan rapat lintas K/L untuk penyusunan RUU Bantuan Hukum.</p> <p>Selain itu, BPHN bersama dengan OMS pelaksana komitmen melakukan riset asesmen standar anggaran bantuan hukum dengan memetakan kebutuhan penerima bantuan hukum dari kelompok rentan dan biaya di luar biaya perkara yang kerap dikeluarkan pencari keadilan. Untuk melaksanakan kegiatan ini, BPHN dan OMS telah melakukan diskusi serta kunjungan lapangan di Jakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>BPHN dan OMS telah melakukan diskusi bersama untuk menindaklanjuti temuan mengenai kebutuhan hukum kelompok rentan serta kunjungan lapangan untuk melakukan asesmen standar anggaran bantuan hukum.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Target B12:</p> <p>Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan kajian OMS terkait pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>Berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh BPHN dan OMS sebagai tindak lanjut survei kebutuhan hukum kelompok rentan (2022), salah satu rekomendasi yang akan ditindaklanjuti bersama mengenai asesmen anggaran bantuan hukum yang berperspektif kelompok rentan.</p> <p>Pada periode B06-B12, OMS pelaksana RAN bersama dengan YLBHI menjalankan advokasi dan penelitian untuk mengetahui kebutuhan anggaran bantuan hukum bagi pemberian bantuan hukum untuk kelompok</p>	<p>Nilai: 100%</p>

	<p>rentan. Hasil penelitian tersebut menjadi acuan untuk diskusi-diskusi perubahan anggaran bantuan hukum yang diupayakan oleh BPHN dan OMS, dan akan dibahas lebih lanjut di internal BPHN pasca B12.</p> <p>Berdasarkan temuan kajian OMS, selain perlunya peningkatan anggaran, juga perlu ada perhatian khusus mengenai anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan afirmasi/dukungan khusus yang belum masuk di anggaran lainnya, serta penguatan untuk anggaran non-litigasi dan pendampingan korban.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>BPHN dan OMS telah melakukan diskusi dan kolaborasi aktif dalam menjalankan target, sehingga ko-kreasi dinilai aktif.</p>	Aktif
<p>Ukuran Keberhasilan 2:</p> <p>Adanya penguatan kapasitas pemberi bantuan hukum (PBH) untuk kelompok rentan</p>		
<p>Badan Pembinaan Hukum Nasional</p>		
<p>Target B06:</p> <p>Adanya diskusi antara BPHN dengan OMS terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>BPHN telah melakukan diskusi peningkatan kapasitas PBH dengan OMS lain, yakni LBH APIK Papua dalam Kegiatan Pelatihan Paralegal Kampung Asei Kecil dan Kampung Nolakla Program Memperbaiki Akses Pada Layanan Hukum dan Sosial Bagi Perempuan (BERDAYA) di Papua tanggal 8 Februari 2023. BPHN juga telah membuat modul pelatihan paralegal bantuan hukum tanggal 10 April 2023 dan 7 Juni 2023.</p> <p>Namun, diskusi belum dapat terlaksana antar BPHN dengan OMS pelaksana komitmen (IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia)</p>	<p>Nilai: 100%</p>

	karena OMS pelaksana masih sedang mengupayakan pendanaan dan menyusun rencana untuk kegiatan penguatan bantuan hukum.	
	Proses Ko-kreasi: Untuk target ini, BPHN telah melakukan ko-kreasi dengan beberapa PBH dan OMS, meskipun bukan dengan OMS pelaksana komitmen.	Aktif
Target B12: Adanya diskusi antara BPHN dengan OMS terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	Capaian Target: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi mengenai rencana penguatan kapasitas PBH untuk memberikan pelayanan bagi kelompok rentan dan membahas muatan panduan pelatihan yang nanti akan dibawakan. Diskusi dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2023 di Hotel Aloft Wahid Hasyim Jakarta dan mengundang perwakilan PBH, beberapa pakar di bidang GEDSI, dan Setnas OGI. Pelatihan yang akan dibawakan bagi PBH berkaitan dengan pemberian layanan kepada kelompok rentan sesuai dengan Starlabankum yang diatur dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2021, dan untuk melakukan penyusunan Standar Operasional Layanan Bantuan Hukum.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi mengenai rencana penyelenggaraan pelatihan PBH, yang berhasil menghasilkan panduan pelatihan. Karena masing-masing pihak berkontribusi secara bermakna dalam diskusi, ko-kreasi dinilai aktif.	Aktif
IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia		

Target B06: Adanya diskusi antara BPHN dengan OMS terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	Capaian Target: Diskusi untuk pembuatan kurikulum pelatihan telah dilaksanakan.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Telah dilaksanakan ko-kreasi untuk membahas pembuatan kurikulum peningkatan kapasitas.	Aktif
Target B12: Adanya diskusi antara BPHN dengan OMS terkait rencana penguatan kapasitas PBH bagi kelompok rentan	Capaian Target: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi mengenai rencana penguatan kapasitas PBH untuk memberikan pelayanan bagi kelompok rentan dan membahas muatan panduan pelatihan yang nanti akan dibawakan. Diskusi dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2023 di Hotel Aloft Wahid Hasyim Jakarta dan mengundang perwakilan PBH, beberapa pakar di bidang GEDSI, dan Setnas OGI. Pelatihan yang akan dibawakan bagi PBH berkaitan dengan pemberian layanan kepada kelompok rentan sesuai dengan Starlabankum yang diatur dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2021, dan untuk melakukan penyusunan Standar Operasional Layanan Bantuan Hukum.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: BPHN dan OMS telah melakukan diskusi mengenai rencana penyelenggaraan pelatihan PBH, yang berhasil menghasilkan panduan pelatihan. Karena masing-masing pihak berkontribusi secara bermakna dalam diskusi, ko-kreasi dinilai aktif.	Aktif
Tindak Lanjut B18:		

1. **Ukuran Keberhasilan 1:** perlu ada pendalaman bersama tidak hanya dengan BPHN, namun juga dengan pihak terkait lainnya, termasuk Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai perluasan anggaran bantuan hukum sebagai bagian dari revisi RUU Bantuan Hukum. BPHN juga diharapkan dapat memberikan pemberitahuan lebih aktif kepada OMS mengenai kemajuan penyusunan RUU Bantuan Hukum.
2. **Ukuran Keberhasilan 2:** perlu dipastikan BPHN dan OMS memiliki sumber daya memadai untuk melaksanakan peningkatan kapasitas yang direncanakan.

Komitmen 14

Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Ukuran Keberhasilan 1: Tersedianya peraturan turunan terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS yang disusun dengan pelibatan masyarakat sipil		
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Target B06: Terlaksananya penyusunan draf peraturan turunan terkait UPTD PPA dengan masukan dari masyarakat sipil	Capaian Target: Kementerian PPPA sudah melakukan penyusunan draf peraturan turunan terkait UPTD PPA.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: KemenPPPA sudah melaksanakan forum konsultasi publik yang mengundang beberapa masyarakat sipil, termasuk INFID. Ke depannya, ko-kreasi dapat dimaksimalkan agar mitra masyarakat sipil yang dilibatkan dalam diskusi juga bisa mendapatkan update mengenai perkembangan penyusunan peraturan turunan UPTD PPA. KemenPPPA juga dapat menghadiri pertemuan koordinasi yang diselenggarakan OGI agar mitra pelaksana komitmen dapat saling meng-update kemajuan pelaksanaan komitmen dan mendiskusikan tindak lanjut ko-kreasi.	Semi-Aktif
Target B12: Tersedianya peraturan turunan terkait UPTD PPA yang telah disusun	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%

dengan masukan dari masyarakat sipil	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)		
Target B06: Terlaksananya pengumpulan data persepsi warga dan operasionalisasi UU TPKS untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan mengenai UPTD PPA	Capaian Target: INFID telah menyusun Laporan Penelitian Needs Assessment: Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasional Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan <i>Policy Paper</i> mengenai konsepsi UPTD PPA dan peraturan turunannya.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: INFID telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), antara lain audiensi pada 2 Februari 2023 dan penyelenggaraan diskusi di Open Government Week 2023 untuk membahas substansi yang dapat mendukung peraturan turunan UPTD PPA. Namun, INFID melaporkan beberapa tantangan dalam memulai komunikasi awalan dengan Kementerian PPPA.	Semi-aktif
Target B12: Tersedianya kajian mengenai implementasi UU TPKS, khususnya terkait UPTD PPA	Capaian Target: INFID sudah membuat policy paper mengenai UPTD PPA dan kajian Needs Assessment yang dapat membantu penyusunan draf peraturan turunan mengenai UPTD PPA.	Nilai: 100%

untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan mengenai UPTD PPA	Proses Ko-kreasi: Pada periode B12, tidak ada ko-kreasi yang terjalin antar KemenPPPA dengan INFID, sehingga mendapatkan nilai pasif.	Pasif
Ukuran Keberhasilan 2: Terlaksananya perbaikan tata kelola UPTD PPA serta perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA		
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Target B06: Tidak ada target B06	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: Tersedianya desain awal untuk standar penerapan UPTD PPA sesuai peraturan turunan dan masukan masyarakat luas	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
International NGO Forum on Indonesian Development		
Target B06: Tidak ada target B06	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target

	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: Tersedianya kajian terkait UPTD PPA, termasuk untuk masukan proses perbaikan tata kelola UPTD PPA	Capaian Target: INFID sudah membuat policy paper mengenai UPTD PPA dan needs assessment. Namun, kajian yang dibuat tidak memuat substansi mengenai usulan perbaikan tata kelola UPTD PPA.	Nilai: 50%
	Proses Ko-kreasi: Pada periode B12, tidak ada ko-kreasi yang terjalin antar KemenPPPA dengan INFID, sehingga mendapatkan nilai pasif.	Pasif
Ukuran keberhasilan 3: Tersedianya peraturan turunan terkait Dana Bantuan Korban (DBK) sebagai peraturan turunan dari UU TPKS		
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)		
Target B06: 1. Terlaksananya kepesertaan LPSK sebagai lembaga pengusul dan pengampu dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan PP (RPP) DBK 2. Terlaksananya konsultasi publik	Capaian Target: 1. LPSK telah melakukan rangkaian rapat penyusunan dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM selaku pemrakarsa RPP DBK pada bulan Februari sampai dengan Juni 2023, termasuk Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) dengan LPSK sebagai anggota PAK untuk membahas RPP DBK TPKS pada tanggal 7 Juni 2023. 2. LPSK telah menjelaskan gambaran perkembangan pembahasan RPP DBK pada rapat yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA pada tanggal 20 Maret 2023, dan menyelenggarakan	Nilai: 100%

pembahasan RPP DBK	diskusi publik pada tanggal 27 Juni 2023.	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>LPSK telah menjalankan berbagai upaya ko-kreasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertemu dengan jaringan masyarakat sipil dalam rangka menjelaskan gambaran perkembangan pembahasan RPP DBK melalui pertemuan yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 20 Maret 2023. • Berpartisipasi sebagai narasumber dalam Open Government Week 2023 di diskusi panel yang mengangkat tema “Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam UU TPKS: Mendorong DBK dan UPTD PPA” pada 11 Mei 2023 • Menyelenggarakan diskusi publik dengan mengundang K/L terkait dan organisasi masyarakat sipil bertempat di Kantor LPSK pada tanggal 27 Juni 2023. 	Aktif
<p>Target B12:</p> <p>1. Terlaksananya kepesertaan LPSK sebagai lembaga pengusul dan pengampu dalam pembahasan RPP DBK pada tahap harmonisasi</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi K/L dalam proses pemberian</p>	<p>Capaian Target:</p> <p>1. LPSK sebagai pengusul dan pengampu muatan RPP DBK telah terlibat dalam rapat pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) RPP DBK yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali rapat pada bulan Agustus s.d. Desember yang dihadiri oleh anggota PAK yaitu Mahkamah Agung, Kemenkopolhukam, Kemensetneg, KemenPPPA, Kemenkeu, Kemensos, Kementerian Agama, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan Kemenkumham.</p>	Nilai: 100%

persetujuan RPP DBK	<p>2. Telah terlaksana koordinasi antar K/L terkait mengenai muatan RPP DBK, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi trilateral antara LPSK, Kemenkumham dan Kemenkeu dengan pembahasan substansi mekanisme hibah dalam RPP DBK pada tanggal 12 Juli 2023. - Koordinasi bilateral antara LPSK dengan Kemenkumham dengan pembahasan substansi mekanisme pemberian DBK pada tanggal 18 September 2023. - Koordinasi antara LPSK, Mahkamah Agung, Kejaksaan serta Kemenkumham dengan pembahasan substansi mekanisme pemberian DBK pada tanggal 11 Oktober 2023. - Koordinasi LPSK bersama KemenPPPA, Kemenkeu, Kemensos, Kemenkes, Komnas Perempuan serta kemenkumham terkait pengaturan pendanaan layanan pemulihan korban TPKS pada tanggal 14 November 2023. 	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Fokus dari capaian LPSK untuk semester B12 adalah koordinasi antar K/L terkait. Namun, LPSK juga telah berinisiatif mengadakan diskusi publik yang mengundang beberapa perwakilan OMS untuk membahas muatan RPP DBK. Selain itu, LPSK juga turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OMS pelaksana Komitmen 14 seperti FGD, sehingga tetap melakukan ko-kreasi dengan masyarakat untuk perbaikan muatan RPP DBK.</p>	Aktif

Kementerian Hukum dan HAM		
Target B06: 1. Tercantumnya usulan draf dalam kerangka regulasi perencanaan 2. Tersusunnya konsepsi draf yang telah teruji kelayakan konsepsi draf	Capaian Target: 1. Usulan RPP DBK TPKS telah dicantumkan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2023, dengan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemrakarsa. 2. Telah tersusun konsep RPP DBK TPKS per Juni 2023, dan telah dilaksanakan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) pada 7 Juni 2023.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Kementerian Hukum dan HAM belum melaksanakan ko-kreasi, karena tahap pembahasan RPP DBK masih di Rapat PAK, sehingga belum dapat melibatkan masyarakat. Namun, LPSK sebagai salah satu Lembaga yang terlibat dalam penyusunan RPP DBK TPKS telah melakukan diskusi dan penjangkaran masukan dari masyarakat sipil untuk mendukung muatan.	N/A
Target B12: Terselenggaranya sosialisasi draf dalam rangka pelibatan publik secara luas	Capaian Target: Telah diselenggarakan diskusi yang mengundang perwakilan masyarakat sipil dalam rangka pelibatan publik untuk mendapatkan masukan atas muatan RPP DBK. Perwakilan yang diundang antara lain IJRS, MaPPI FH UI, LeIP, Yayasan Sukma, ICJR, INFID, FPL, dan Jaringan Masyarakat Sipil/CSO (JMS) yang bergerak di bidang GEDSI.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi:	Aktif

	K/L telah melibatkan OMS dalam pemberian masukan atas muatan RPP DBK melalui kegiatan diskusi yang diselenggarakan.	
Indonesia Judicial Research Society (IJRS), International NGO Forum on Indonesian Development		
Target B06: 1. Terlaksananya penyusunan kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan terkait DBK 2. Terlibatnya masyarakat sipil dalam konsultasi publik pembahasan RPP DBK	Capaian Target: IJRS dan INFID telah melakukan penyusunan kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan terkait DBK. IJRS dan INFID juga telah terlibat dalam Diskusi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban (RPP DBK) pada 27 Juni 2023 yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta menyelenggarakan Side Event pada Open Government Week 2023 yang mengundang Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: OMS telah melakukan ko-kreasi dalam melaksanakan capaian, antara lain melalui partisipasi dalam diskusi pembahasan muatan untuk mendukung peraturan turunan mengenai DBK.	Aktif
Target B12: 1. Tersedianya kajian terkait DBK untuk mendukung penyusunan draf peraturan turunan terkait DBK	Capaian Target: 1. INFID telah membuat policy paper mengenai RPP DBK yang juga telah disampaikan kepada LPSK. Selain itu, IJRS sedang melakukan proses penyusunan kajian lebih komprehensif mengenai DBK yang dapat dijadikan	Nilai: 100%

<p>2. Terlibatnya masyarakat sipil dalam sosialisasi draf dalam rangka pelibatan publik secara luas</p>	<p>acuan tidak hanya dalam penyusunan muatan RPP DBK, namun juga untuk implementasi skema DBK ke depannya. Pada B06-B12, IJRS telah mengontrak beberapa tenaga ahli untuk menulis kajian dan telah membuat kerangka kajian di Desember 2023. Kajian diperkirakan akan selesai pada tahun 2024. Untuk mendukung penyusunan kajian dan mengetahui kemajuan pembahasan dan penyusunan muatan RPP DBK, IJRS telah mengundang LPSK dalam FGD pada 12 Oktober 2023.</p> <p>2. INFID dan IJRS telah diundang dan terlibat dalam Rapat Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh LPSK pada tanggal 27 Juni 2023 untuk membahas muatan RPP DBK.</p>	
	<p>Proses Ko-kreasi:</p> <p>Dalam pencapaian target ini, OMS telah melakukan FGD bersama LPSK untuk menggali perkembangan RPP DBK lebih lanjut, yang berguna untuk mengembangkan kajian yang sedang disusun. OMS juga telah terlibat dalam kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan LPSK dalam rangka sosialisasi draf dan mendapatkan masukan atas muatan RPP DBK.</p>	<p>Aktif</p>
<p>Tindak Lanjut B18:</p> <p>1. Ukuran Keberhasilan 1: Pada B18, perlu ada update mengenai perkembangan penyusunan peraturan turunan mengenai UPTD PPA. Jika peraturan turunan masih dalam pembahasan, KemenPPPA dapat menyelenggarakan kegiatan untuk mendapatkan masukan publik demi menjamin adanya partisipasi bermakna, sekaligus mendapatkan masukan atas substansi dari peraturan turunan yang disusun.</p>		

2. Ukuran Keberhasilan 2: Perlu ada ko-kreasi antar KemenPPPA dan OMS mengenai perbaikan tata kelola UPTD PPA sesuai dengan muatan peraturan turunan yang dikonsepskan, dengan masukan dari publik yang lebih luas.

3. Ukuran Keberhasilan 3:

- Pada B18, draf hasil PAK dan proses harmonisasi atas RPP DBK perlu diselesaikan. Meskipun proses ini merupakan kegiatan antar Kementerian/Lembaga, diharapkan LPSK dapat tetap aktif menjaring masukan publik dan terlibat dalam diskusi mengenai muatan DBK yang diselenggarakan masyarakat, sebagaimana telah dilakukan pada periode B06-B12.
- OMS sudah membuat outline kajian mengenai DBK pada B12. Pada B18, OMS dapat melanjutkan muatan kajian dan tetap aktif melibatkan LPSK dalam diskusi untuk melengkapi muatan kajian, sekaligus agar LPSK dapat mendapatkan masukan substantif mengenai DBK, terutama mengenai mekanisme DBK.

Komitmen 15

Pengembangan Keterbukaan Data SDA-LH dan Tata Ruang

Ukuran Keberhasilan 1: Penyusunan data prioritas sektor SDA-LH yang partisipatif		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		
Target B06: Penyusunan daftar data prioritas di sektor lingkungan hidup dan SDA	Capaian Target: Penyusunan Daftar Data Prioritas akan dilakukan di Semester 2	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Penyusunan Daftar Data Prioritas akan dilakukan di Semester 2	Aktif
Target B12: Penyusunan daftar data prioritas di sektor lingkungan hidup dan SDA	Capaian Target: Penyusunan Usulan Daftar Data Prioritas 2024 telah diberikan kepada Sekretariat SDI melalui usulan Dit. ANTB Kementerian PPN/Bappenas	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Proses Penyusunan Data telah dilakukan secara ko-kreasi antara Setnas OGI dengan OMS	Semi-Aktif
Indonesian Center for Environmental Law, Publish What You Pay		
Target B06: 1. Kajian urgensi dibentuknya gugus	Capaian Target: Data dukung terkait kajian Urgensi telah dikirimkan pada Semester II	Nilai: 100%

tematik satu data SDA & LH 2. Kajian data prioritas SDA & LH	Proses Ko-kreasi: Kajian dilakukan hanya oleh CSO, belum dilakukan partisipatif dengan K/L terkait	Pasif
Target B12: Penyusunan kajian terkait pertukaran dan integrasi data di seluruh K/L/D	Capaian Target: ICEL dengan Auriga dan PWYP telah menyusun kajian terkait Dasar hukum untuk Usulan Daftar Data Prioritas 2024 untuk diusulkan kepada Sekretariat OGI dan masuk dalam Usulan Daftar Data Prioritas 2024	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Usulan daftar data prioritas dikerjakan oleh satu pihak CSO dengan telah dilakukan diskusi dengan Sekretariat OGI	Semi-Aktif
Ukuran Keberhasilan 2: Pemetaan internal dalam K/L/D tentang masalah tata kelola Satu Data Sektor SDA-LH		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		
Target B06: Penyusunan pemetaan internal dalam K/L/D tentang masalah tata kelola Satu Data Sektor LH-SDA	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%

Forum Koordinasi kebutuhan Data Prioritas Sektor SDHLH, yang melibatkan OMS	Telah dilakukan rapat koordinasi dengan OMS dan Sekretariat SDI. Proses komunikasi Usulan Daftar Data Prioritas telah difasilitasi Sekretariat OGI	
	Proses Ko-kreasi: Proses Ko-kreasi belum dilaksanakan secara aktif, perlu dukungan dan penjembutan dari Sekretariat OGI	Semi-Aktif
ICEL, Media Link, PWYP Indonesia, Auriga Nusantara		
Target B06: Penyelenggaraan diskusi kelompok terpumpun antara CSO dengan masing-masing K/L/D untuk memetakan potensi dan tantangan pelaksanaan Satu Data Sektor LH-SDA	Capaian Target: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi: Tidak mengumpulkan data dukung (Data dukung ditunggu sampai dengan H+7 Multistakeholder Forum II)	Pasif
Target B12: Penyusunan kertas kebijakan terkait usulan potensi dan tantangan pelaksanaan satu data sektor SDA-LH SDA	Capaian Target: ICEL dengan Auriga dan PWYP telah menyusun kajian terkait Dasar hukum untuk Usulan Daftar Data Prioritas 2024 untuk diusulkan kepada Sekretariat OGI dan masuk dalam Usulan Daftar Data Prioritas 2024	Nilai: 100%
	Proses Ko-kreasi: Belum terdapat ko-kreasi antar K/L dalam menyusun kertas kebijakan	Pasif
Ukuran Keberhasilan 3:		

Penyelenggaraan forum satu data di sektor SDA-LH untuk persiapan data prioritas dan standar data, dan publikasi di portal data		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		
Target B06:	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: Penyelenggaraan pra-forum data LHSDA antara KLHK dan Pemerintah Daerah Piloting	Capaian Target: Data dukung belum diterima	Nilai: 0%
	Proses Ko-kreasi:	Pasif
ICEL, Media Link, PWYP Indonesia, Auriga Nusantara		
Target B06:	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: Diseminasi kertas kebijakan terkait potensi dan tantangan satu data di sektor LH-SDA	Capaian Target: ICEL dengan Auriga dan PWYP telah menyusun kajian terkait Dasar hukum untuk Usulan Daftar Data Prioritas 2024 untuk diusulkan kepada Sekretariat OGI dan masuk dalam Usulan Daftar Data Prioritas 2024	Nilai: 100%

sebagai rekomendasi dalam forum satu data di sektor lingkungan hidup SDA	Proses Ko-kreasi: Belum terdapat ko-kreasi dalam penyusunan diseminasi kertas kebijakan	Pasif
Ukuran Keberhasilan 4: Penyajian data SDA-LH dalam portal Satu Data Indonesia		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional		
Target B06: Tidak ada target	Capaian Target: Tidak ada target	Nilai: Tidak ada target
	Proses Ko-kreasi: Tidak ada target	Tidak ada target
Target B12: Tidak ada target	Capaian Target: -	Nilai: -
	Proses Ko-kreasi: -	-
Tindak Lanjut B18: <ul style="list-style-type: none"> - Usulan daftar data prioritas telah disampaikan kepada Sekretariat SDI dan sedang dalam proses penyusunan Daftar Data Prioritas 2024. - Daftar data prioritas akan ditetapkan selanjutnya oleh Sekretariat Satu Data Indonesia melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas. 		